

Resolusi[2]
Kongres Nasional ke-VII
(Luarbiasa)
Partai Komunis Indonesia

KT :-
56

Depagitprop CC PKI

30 AUGUST 1963

KAUM BURUH SEMUA NEGERI, BERSATULAH!

KT: -56

Resolusi[2]
Kongres Nasional ke-VII
(Luarbiasa)
Partai Komunis Indonesia

Djakarta 25-30 April 1962

Depagitprop CC PKI
Djakarta 1962

PERPUSTAKAAN
Lembaga Kebudajaan Indonesia

Lemb. Kebudajaan Ind.
Perpustakaan
tanggal 18-9-1963
asal usul No. 1392. A

RESOLUSI TENTANG LAPORAN UMUM CC KEPADA KONGRES NASIONAL KE-VII (LUARBIASA) PKI

Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) PKI, jang dilangsungkan pada tanggal 25 s/d 30 April di Djakarta berhubung dengan keharusan penjesuaian Konstitusi (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) dan Program PKI dengan ketentuan² Penpres No. 7/1959 dan Perpres No. 13/1960, setelah mendiskusikan Laporan Umum CC jang disampaikan oleh Ketua Partai, Kawan D.N. Aidit, jang berdjudul *UNTUK DEMOKRASI, PERSATUAN DAN MOBILISASI*, dengan suara bulat menerima Laporan tersebut sebagai pedoman aktivitet bagi segenap anggota Partai.

Kongres berpendapat bahwa Laporan telah setjara tepat memberikan penilaian tentang perkembangan situasi politik dalam dan luarnegeri dan tentang perkembangan Partai selama masa antara Kongres Nasional ke-VI sampai dilangsungkannja Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) sekarang ini, dan berdasarkan penilaian² ini telah menetapkan tugas² urgen daripada Partai untuk masa² selandjutnja.

Kongres sependapat dengan Laporan jang menegaskan bahwa ia bukan ditudjukan untuk memberikan tanggungdjawab tentang pelaksanaan seluruh tugas jang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-VI dan djuga bukan untuk menetapkan tugas² pokok baru, *karena mengenai ini masih berlaku sepenuhnja apa jang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-VI. Tegasnja, mertjusuar kaum Komunis Indonesia dalam segala kegiatannja masih tetap instruksi² dan petundjuk² jang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-VI.*

5

PERPUSTAKAAN
Lembaga Kebudajaan Indonesia

Kongres memperkuat kesimpulan, bahwa Kongres Nasional ke-VI telah sangat mempertinggi kemampuan Partai dan telah memperkuat kedudukan berinisiatif daripada Partai dan bahwa kepertjajaan massa Rakjat kepada Partai terus bertambah besar dan dalam keadaan politik jang betapapun sulit dan rumitnja massa Rakjat pekerdja mengerti politik dan taktik Partai.

Kongres djuga menjetudjui kesimpulan bahwa kekuatan progresif telah lebih berkembang dan lebih terkonsolidasi serta peranannja makin menentukan dalam kehidupan politik negeri; bahwa persatuan antara kekuatan progresif dengan kekuatan tengah, terutama dengan sajap kirinja, sudah bertambah kokoh; bahwa peranan sajap kiri dalam kekuatan tengah serta keberaniannja dalam melawan kaum kepalabatu bertambah besar; bahwa kekuatan kepalabatu sudah makin terbongkar borok²nja; bahwa kaum kanan baru dalam waktu jang tidak begitu lama sudah bukan baru lagi, karena perbuatan²nja jang merugikan Rakjat, karena kebusukan dan kedjahatan² mereka sudah tjukup dikenal oleh massa luas dan karena persatuan mereka jang sudah mulai mesra dengan kaum kanan lama; dan bahwa usaha² penjatuan kaum kanan baru dengan kaum kanan lama telah menimbulkan kontradiksi² jang makin hari makin menadjam dikalangan kaum kanan sendiri.

Kongres sependapat dengan Laporan, bahwa Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) sekarang ini dilangsungkan dalam situasi internasional jang sangat baik, jang ditandai oleh kemenangan² kekuatan² baru jang sedang tumbuh („the new emerging forces") terhadap kekuatan² kolot jang masih bertjokol ("the old established forces") ditandai oleh sukses² besar perdjuangan kemerdekaan nasional dan oleh pembangunan Sosialisme disemua negeri sosialis jang dimahkotai oleh pembangunan Komunisme di Uni Sovjet; bahwa Kongres dilangsungkan dalam mendjelang genap tiga tahun Kabinet Kerdja melaksanakan Triprogramnja, dimana seluruh Rakjat mengharapkan adanja perubahan dalam sistim politik dan da-

lam kebebasan politik bagi Rakjat; dan bahwa ia djuga dilangsungkan dalam keadaan dimana persatuan Marxis-Leninis didalam Partai makin membadja, dimana setjara politik, organisasi dan ideologi, Partai makin terkonsolidasi, semangat mengabdi dan beramal kepada Rakjat makin meninggi.

I

1. *Madju Terus Untuk Demokrasi dan Kabinet Gotongrojong.*

Kongres membenarkan kesimpulan bahwa dibawah tuntutan pokok Kongres Nasional ke-VI, jaitu: *Untuk Demokrasi Dan Kabinet Gotongrojong,* perdjuangan Rakjat untuk menjelesaikan tuntutan^2 Revolusi Agustus 1945 selama dua setengah tahun ini telah mentjapai hasil^2 tertentu, dan bahwa tuntutan ini adalah sedjalan dengan tuntutan^2 pelaksanaan Manipol dengan konsekwen, pelaksanaan Ketetapan MPRS No. I dan II, jaitu Garis Besar Haluan Negara dan Garis Besar Haluan Pembangunan.

Tetapi Kongres djuga sepenuhnja sependapat dengan Laporan, bahwa selama belum ada pengubahan demokratis dalam sistim politik jang sepenuhnja mentjerminkan kegotongrojongan nasional sesuai dengan Konsepsi Presiden Sukarno (pidato 21 Februari 1957), selama itu pelaksanaan daripada segala jang sudah dirumuskan dengan baik dalam per-undang^{2}an dan garis^2 politik serta program^2 pemerintah, bukan hanja tidak akan lantjar djalannja bahkan pasti mengalami kegagalan.

Adalah sesuai dengan kenjataan bahwa Laporan menjimpulkan bahwa tuntutan pembentukan Kabinet Gotongrojong makin hari makin santar dan bahwa dikalangan golongan tengah aliran jang menjetudjuinja makin kuat, meskipun kaum reaksioner, terutama golongan kepalabatunja, berusaha keras untuk melawannja dengan

djalan memetjah persatuan nasional jang berporoskan Nasakom dan dengan djalan menanamkan semangat Komunisto-phobi dikalangan golongan tengah, terutama sajap kanannja.

Kongres menganggap tepat sekali taktik Partai seperti jang dikemukakan dalam rapat Dasawarsa HR pada tanggal 31 Djanuari 1961. Dengan taktik ini telah dapat dikerahkan kekuatan jang lebih besar untuk mengadakan perubahan dalam sistim politik dan dalam kebebasan politik bagi Rakjat.

Kongres sependapat dengan Laporan, bahwa meskipun telah diadakan perubahan jang bersifat penggolongan-kembali atau regruping Kabinet Kerdja dan meskipun dengan regruping ini orang² Komunis tidak hanja bukan tidak dipersoalkan, tetapi malahan didudukkan dalam Kabinet, dan meskipun struktur Kabinet mengalami beberapa perubahan, tetapi personalia jang penting² adalah tetap, sehingga regruping ini tidak mengubah hakekat Kabinet Kerdja dan oleh karena itu, walaupun mendapat sambutan dari Rakjat, tapi tidak hangat.

Dalam hubungan dengan regruping Kabinet Kerdja, Kongres membenarkan kesimpulan Laporan Umum, bahwa dengan regruping ini segala omongkosong tokoh² Masjumi dan Front Anti Komunis (FAK) dimasa silam tentang „kecharaman" bagi orang Muslim untuk duduk dalam satu kabinet dengan orang Komunis, mendjadi lenjap bagaikan embun kena sinar matahari pagi, bahwa dengan diangkatnja tokoh² partai² politik sebagai menteri duduk dalam Musjawarah Pimpinan Negara (MPN) menundjukkan adanja ketjenderungan kearah demokratisasi sistim pemerintahan, dan bahwa Presiden dengan ini, meskipun belum meminggirkan samasekali, tetapi sudah memelorotkan sebagian menteri pembantunja jang berkepalabatu tidak mau mendengarkan kritik² Rakjat dan tidak betjus, dan bahwa oleh karena itu regruping ini adalah positif dan harus disambut baik.

Mengenai omongan kaum reaksioner jang mengatakan

bahwa dengan duduknja orang² Komunis sebagai menteri dalam Kabinet, PKI sudah ikut bertanggungdjawab terhadap semua tindakan Pemerintah atau jang mengatakan bahwa sekarang telah terbentuk Kabinet Nasakom atau Kabinet Gotongrojong, karena didalam Kabinet sudah duduk tokoh² PNI dan NU dan PKI, Laporan Umum dengan tegas mendjawab bahwa Presiden sendiri tidak pernah menamakannja Kabinet Gotongrojong atau Kabinet Nasakom, bahwa dalam struktur Kabinet sekarang ini kekuasaan Negara terletak pada *musjawarah kabinet* dan pada *rapat kerdja kabinet*, dimana tidak duduk, apalagi duduk setjara wadjar dan adil orang² Komunis dan tokoh² partai² politik lainnja, dan bahwa oleh karena itu PKI sekali² tak dapat dianggap bertanggungdjawab terhadap semua tindakan pemerintah.

Tetapi, walaupun PKI tidak bertanggungdjawab terhadap semua tindakan Pemerintah, Laporan Umum menegaskan bahwa ini tidaklah berarti bahwa kaum Komunis bersikap pasif dan bertopang dagu melihat kemerosotan² dan kesulitan² dibidang ekonomi dan keuangan jang makin lama makin mendjadi dan bahwa kaum Komunis harus setjara sukarela ambilbagian dalam usaha mengatasi kesulitan² penghidupan Rakjat. Ini disebabkan, *pertama*, karena kaum Komunis tidak mungkin membiarkan penderitaan Rakjat terus memuntjak sebagai akibat daripada ketidakmampuan, ketidaksungguhan dan pentjolengan², dan *kedua*, karena Pemerintah Indonesia, terutama Presiden Sukarno sebagai kepalanja, adalah melawan imperialisme, jaitu musuh pertama kaum Komunis dan Rakjat Indonesia.

2. *Kibarkan Tinggi² Tripandji Bangsa*

Berbitjara tentang gagasan Demokrasi Terpimpin, Laporan menundjukkan bahwa meskipun sudah hampir 3 tahun sedjak gagasan Demokrasi Terpimpin mulai dilaksanakan, tetapi pengalaman Rakjat membuktikan, bahwa korupsi dan birokrasi belum teratasi, bahkan makin men-

djadi, dan bahwa ini memang tidak mungkin diatasi dan dihapuskan djika tidak ada kekuasaan Rakjat, dimana kaum buruh dan kaum tani memegang peranan jang utama.

Laporan mendjelaskan bahwa dalam situasi jang demikian itu, Partai telah menetapkan garis politik jang tepat berdasarkan perimbangan kekuatan, jaitu memperkembangkan segala ide dan segala segi jang positif dari gagasan Demokrasi Terpimpin dari Presiden Sukarno, hal mana berarti disatu fihak menghimpun segala kekuatan progresif dan revolusioner untuk melaksanakan gagasan tersebut setjara tepat, dan difihak lain melawan segala kekuatan reaksioner jang hendak menjelewengkan gagasan tersebut kedjurusan jang pada hakekatnja sama dengan tjara² fasis jang dilakukan atas nama dan dalam bungkusan Demokrasi Terpimpin.

Laporan menundjukkan bahwa dipusat, manakala pelaksanaan Demokrasi Terpimpin itu langsung ditangan konseptornja sendiri, jaitu Presiden Sukarno, kita melihat, walaupun banjak rintangan, ada usaha untuk melaksanakan *demokrasi* jang terpimpin, tetapi di-daerah² gagasan Demokrasi Terpimpin telah kehilangan demokrasinja dan jang ketinggalan hanja „Terpimpinnja", sehingga diberbagai daerah orang menjaksikan se-olah² kekuasaan hanja ada disatu tangan sadja. Kenjataan ini tidak bisa lain daripada membuktikan, bahwa gagasan Demokrasi Terpimpin dan gagasan Gotongrojong belum berdjalan sebagaimana mestinja, terutama di-daerah². Djika tadinja demokrasi liberal adalah indentik dengan korupsi dan birokrasi, maka dengan „terpimpin" tok Demokrasi Terpimpin mendjadi sering identik dengan diktatur perseorangan kapitalis birokrat jang lebih korup dan lebih tidak tahu malu.

Mengenai Pemerintah² Daerah, Laporan mengingatkan bahwa seharusnja dibentuk sesuai dengan ketetapan MPRS, sedang mengenai Pemilihan Umum Laporan mengingatkan kepada djandji Pemerintah untuk melaksanakannja pada achir tahun 1962, tetapi jang sampai

sekarang belum djuga tampak persiapan²nja, padahal menurut MPRS pemilihan umum untuk MPR, DPR dan DPRD supaja dilakukan bersamaan.

Kongres memperkuat Laporan jang menuntut supaja „Keadaan Perang" tjukuplah berlaku untuk daerah dimana masih terdapat sisa² gerombolan jang djumlahnja besar, sedangkan bagi daerah² lainnja supaja dihapuskan samasekali. Hanja dalam keadaan ada demokrasi, gagasan Demokrasi Terpimpin mungkin berdjalan setjara normal.

Mengenai perdjuangan pembebasan Irian Barat, Kongres memperkuat Laporan Umum jang menegaskan bahwa sikap tegas haruslah djuga berarti menghabiskan samasekali sisa² kekuasaan modal Belanda dalam perusahaan² tjampuran seperti BPM/Shell, Unilever dan lainnja dengan mensita modal² Belanda dalam perusahaan² tersebut dan supaja status perusahaan² Belanda jang telah diambilalih dan dinasionalisasi diubah mendjadi disita.

Kongres menjambut hangat Laporan jang menjatakan bahwa untuk suksesnja perdjuangan pembebasan Irian Barat seluruh bangsa harus mengibarkan tinggi² Tripandji bangsa, jaitu pandji *Demokrasi, Persatuan* dan *Mobilisasi,* dan harus berdjuang dengan tekad: *satu tangan pegang bedil, dan satu tangan lagi pegang patjul,* artinja: *siap untuk bertempur dan siap pula memperkuat garis belakang.*

Laporan mendjelaskan bahwa pengibaran tinggi² Tripandji Bangsa, jaitu demokrasi, persatuan dan mobilisasi merupakan masalah politik dalamnegeri jang mahapenting sekarang untuk menudju *pengubahan demokratis jang konsekwen dilapangan sistim politik dan dilapangan kebebasan politik bagi Rakjat,* kongkritnja untuk menudju: *terbentuknja Kabinet Gotongrojong dan pentjabutan keadaan bahaja, serta penindjauan kembali UUKB jang berlaku sekarang.*

Mengenai perundingan dengan fihak Belanda, Laporan dengan tandas menegaskan bahwa ini hanja mungkin dibenarkan djika atas dasar penjerahan kekuasaan di

Irian Barat kepada Republik Indonesia, tanpa memberikan hak² istimewa dibidang ekonomi kepada Belanda atau Amerika Serikat, jang dalam sengketa Indonesia-Belanda berusaha untuk menggantikan posisi ekonomi Belanda di Indonesia, dan bahwa perundingan harus dilakukan setjara bilateral antara Indonesia-Belanda, tanpa fihak ketiga, terbuka dan selama berunding pelaksanaan Trikomando Rakjat harus berdjalan terus. Sembojan kita jalah: *kita tjinta damai, tetapi lebih tjinta kemerdekaan.*

Kongres dengan gembira menjambut bahwa dalam perdjuangan untuk pembebasan Irian Barat kedalam kekuasaan Republik Indonesia, Partai telah berhasil menarik perhatian dan sokongan Partai² Komunis dan Buruh dari 5 benua dan bahwa djuga organisasi² revolusioner Rakjat telah berhasil menarik simpati dan sokongan organisasi² massa internasional jang progresif pada perdjuangan pembebasan Irian Barat. Dalam hubungan ini, Kongres dengan rasa terimakasih jang se-dalam²nja menjampaikan salut jang se-tinggi²nja kepada Partai Komunis dan kaum buruh Nederland, kepada Partai Komunis dan kaum buruh Djepang, kepada Partai Komunis dan kaum buruh Australia serta Partai² Komunis dan kaum buruh negeri² lain jang dengan tulus ichlas dan militansi jang tinggi menjatakan solidaritet serta bantuannja kepada Rakjat Indonesia dalam perdjuangan mengusir kolonialisme Belanda dari Irian Barat.

3. *Berdjuang Terus Untuk Kemerdekaan Ekonomi*

Kongres sepenuhnja membenarkan bahwa konstatasi Kongres ke-VII jang menjatakan bahwa krisis ekonomi masih mentjengkeram Indonesia masih tetap berlaku dan kini bertambah serius. Kemunduran² dalam hampir semua sektor ekonomi jang vital telah membawa akibat jang lebih buruk dalam penghidupan Rakjat se-hari². Kenaikan harga jang terus-menerus jang menjebabkan

semakin meningkatnja ongkos hidup dan semakin merosotnja dajabeli Rakjat pekerdja telah menimbulkan gerakan2 massa untuk membela dirinja dari kesulitan2 jang makin tak teratasi.

Laporan menundjukkan bahwa sektor produksi tidak bisa bekerdja dengan kapasitet jang tinggi disebabkan oleh banjak faktor, antara lain disebabkan karena terus merosotnja persediaan bahan2 baku dan penolong.

Laporan menjimpulkan bahwa tugas memelihara sektor2 ekonomi vital jang ada dan melaksanakan pembangunan nasional semesta dan berentjana akan menghadapi kesukaran2 jang lebih besar lagi, apabila tidak segera diadakan perubahan2 penting dalam bidang ekonomi. Pada waktu sekarang kesimpulan Kongres ke-VI mengenai krisis ekonomi Indonesia masih tetap berlaku dan perlu mendapat perhatian, jaitu: *„bahwa krisis ekonomi kita berpangkal kepada sifatnja jang kolonial jang masih sangat tergantung pada pasaran dunia ekonomi kapitalis"*.

Laporan selandjutnja menundjukkan bahwa perkembangan semendjak Kongres ke-VI dapat dikatakan bahwa akibat2 buruk krisis ekonomi kapitalis atas Indonesia bertambah luas, jang *disebabkan karena belum diadakannja perombakan2 jang fundamentil dilapangan ekonomi menudju kemerdekaan ekonomi Indonesia*, berhubung masih terdapat orang2 jang bertanggungdjawab dalam tubuh pemerintah jang belum bertindak sesuai dengan tuntutan2 revolusi Agustus 1945, dengan Manipol. Selama tindakan2 ekonomi hanja bersifat tambal-sulam seperti sekarang, maka dengan sendirinja situasi ekonomi Indonesia akan tetap tidak akan terlepaskan dari tjengkeraman krisis ekonomi jang serius.

Adalah pula kenjataan bahwa Anggaran Belandja masih lebih dari 60% setjara langsung dan tidak langsung tergantung pada madju mundurnja perdagangan luarnegeri jang djatuh-bangun dengan kegontjangan pasar dunia kapitalis, sekalipun belakangan ini sudah ada kemadjuan2 dalam perdagangan dengan negeri2 sosialis,

PERPUSTAKAAN
Lembaga Kebudajaan Indonesia

jaitu mendjadi 10 sampai 13%, tetapi kesempatan jang terbuka dari negeri² sosialis belum digunakan se-maksimum²nja. Kongres memperkuat kesimpulan bahwa soal kemerdekaan ekonomi dibidang perdagangan luarnegeri adalah soal ada atau tidak ada kesungguhan, soal sesuai atau tidak sesuainja perbuatan dengan Manipol, dengan politik bebas dan aktif Pemerintah. Demikian pula dalam lalulintas pembajaran internasional serta sistim keuangan sebenarnja Indonesia masih berada dalam kontrol kaum kapitalis monopoli dunia, terutama Amerika Serikat, lewat IMF (International Monetery Funds) dan Bank Dunia (IBRD — International Bank for Reconstruction and Development) sebagai akibat daripada persetudjuan KMB jang sudah dibubarkan itu. Kongres menjerukan agar keanggotaan Indonesia dalam IMF segera diachiri.

Kongres membenarkan kesimpulan, bahwa tidak hanja kontradiksi dibidang ekonomi dan keuangan antara Indonesia dengan kaum imperialis makin lama makin luas dan terbuka, tetapi djuga kontradiksi antara Rakjat dan sisa² feodalisme dalam hubungan agraria semakin njata dan mendorong madju gerakan tani. Sekalipun baru merupakan perubahan tanah (landreform) jang terbatas dan belum perubahan tanah seperti jang dituntut oleh PKI dalam Program Umum dilapangan agraria, tetapi dalam batas² tertentu ia menggerowoti kekuasaan tuan-tanah dan bisa menguntungkan kaum tani.

Kongres sepenuhnja sependapat dengan Laporan, bahwa usaha memenuhi sendiri akan sandangpangan, terutama beras, tidaklah mungkin hanja dengan main komando dalam produksi dan distribusi dan bahwa kuntji-nja jalah: *bebaskan kaum tani dari sisa² penghisapan feodal, bagikan tanah tuantanah kepada buruhtani dan tanimiskin, dan dalam hubungan untuk meningkatkan produksi pertanian adjak kaum tani berunding dalam kedudukan sebagai tuanrumah negeri ini.*

Berbitjara mengenai ekonomi sektor negara, Laporan menjimpulkan bahwa ekonomi sektor negara di Indonesia pada waktu sekarang dapat memegang peranan pro-

gresif dalam perdjuangan menudju kemerdekaan ekonomi negeri, *tetapi ia bisa djuga tidak mempunjai peranan jang progresif, malahan bisa reaksioner dalam praktek apabila tidak bersih dari kaum kapitalis birokrat atau kaum pentjoleng dalam perusahaan² negara dan alat² kekuasaan negara.*

Mengenai sebab² mengapa ekonomi sektor negara jang sudah meliputi sebagian besar sektor ekonomi jang vital tidak berhasil mengatasi kematjetan sekarang, Laporan mendjelaskan bahwa sebabnja jalah *karena kekurangan² dalam pengurusan (management), karena kaum buruh dan Rakjat pekerdja lainnja tidak diikutsertakan dalam kontrol, dan perbuatan² kaum kapitalis birokrat jang mentjoleng dan menjebarkan Serikatburuh-phobi, Komunisto-phobi, Nasakom-phobi dsb. Ternjata selama ini bahwa birokrasi memang satu dan takterpisahkan dengan kaum kapitalis birokrat* jang lebih banjak menggerowoti daripada mengurus kekajaan negara, jang lebih mementingkan perusahaan² bajangan miliknja sendiri, keluarganja, kontjonja atau komplotannja. Bukan sadja perusahaan² negara jang dirugikan dengan komplotan kaum kapitalis birokrat, tetapi djuga fihak pengusaha² nasional dirintangi perkembangannja.

Berdasarkan pengalaman beberapa tahun ini, Laporan setjara tepat menjimpulkan bahwa kaum kapitalis birokrat, jalah mereka *jang mendjadi kapitalis dengan menggunakan kedudukannja dalam alat kekuasaan atau perusahaan negara atau hubungannja dengan pembesar² dalam alat kekuasaan atau perusahaan negara. Mereka menggunakan birokrasi, dan sekarang terutama menggunakan keadaan bahaja sebagai perisai untuk mendapatkan dan memperkuat posisinja sebagai kapitalis.* Sama dengan kaum komprador (agen² modal monopoli asing), mereka adalah anti-demokrasi, anti-organisasi Rakjat, anti-persatuan nasional (anti-Nasakom, anti-Gotongrojong, anti-Komunis), berusaha mempererat hubungan ekonomi, politik dan militer dengan negeri² imperialis

serta bekerdja sama dengan kaum tuantanah untuk menindas kaum tani.

Laporan menundjukkan bahwa kaum kapitalis birokrat, setelah ternjata mereka tidak berdaja, se-akan² tidak menentang prinsip² memperkuat ekonomi sektor negara, malahan mereka dengan menggunakan kedudukannja dalam pemerintahan setjara rojal mengeluarkan uang buat membangun perusahaan² negara dengan tudjuan untuk dibangkrutkan dikemudian hari dan dengan alasan „tidak untung" menswastakannja serta memberikannja kepada kontjo²nja jang sudah direntjanakan lebih dahulu. *Oleh karena itu kita harus menentang keras penswastaan perusahaan² negara, karena djika ini mendjadi kebiasaan berarti membuka pintu lebar bagi kaum kapitalis birokrat dan kaum subversif untuk melumpuhkan ekonomi negara.*

4. *Demokrasikan Pelaksanaan Plan 8 Tahun*

Laporan mendjelaskan bahwa sesuai dengan kesimpulan Sidang Pleno ke-II CC pada achir Desember 1960, Partai mengambil sikap mendukung Ketetapan² MPRS dan menjerukan supaja *Ketetapan² MPRS mendjadi program persatuan seluruh Rakjat dan harus disukseskan melalui aksi² massa.* Ketetapan MPRS No. I dan No. II serta lampirannja menampung banjak tuntutan Rakjat dibidang sosial, ekonomi, politik, kebudajaan jang kini diperdjuangkan oleh massa Rakjat melalui aksi² massa revolusioner.

Kongres dengan rasa tjemas mentjatat bahwa meskipun Plan 8 Tahun sudah satu tahun lewat dimulai, tetapi ketjenderungan ekonomi dan keuangan negara masih terus merosot sebagai dikemukakan didalam Laporan. Oleh karena itu, tanpa berusaha keras mengadakan koreksi terhadap semua sebab² kematjetan, maka krisis ekonomi sekarang tidak akan teratasi dan Plan 8 Tahun akan gagal.

Laporan menundjukkan bahwa kaum reaksi berkepen-

tingan untuk menggagalkan Plan 8 Tahun. *Pertama,* karena Plan 8 Tahun adalah program bersama persatuan nasional jang berporoskan Nasakom berlandaskan Manipol dan Amanat Pembangunan Presiden jang bersifat anti-imperialis dan anti-feodal. *Kedua,* karena suksesnja Plan 8 Tahun akan berarti tertjapainja swasembada sandangpangan dan dimulainja pembangunan industri, jang berarti sangat berkurangnja ketergantungan ekonomi Indonesia pada negara² imperialis, berarti diperlemahnja imperialisme jang mendjadi sandaran hidup kaum burdjuis komprador. Laporan menundjukkan pula bahwa halangan jang pokok menurut pengalaman selama ini jalah elemen² reaksioner, terutama kaum kapitalis birokrat, jang masih terdapat dalam aparatur negara.

Kongres membenarkan Laporan jang menjimpulkan bahwa salahsatu kelemahan Plan 8 Tahun jalah karena Plan itu tidak disusun berdasarkan plan² kongkrit dari bawah menurut kemampuan alat, tenaga dan modal jang tersedia dan bahwa oleh karena itu sangat diperlukan perintjian tahunan berdasarkan prioritet² tertentu dan pengorganisasian pelaksanaan. Problim lainnja jang belum dipetjahkan jalah masalah koordinasi jang efektif antara berbagai sektor, sehingga nampak sangat kesimpang-siuran dalam soal pembagian wewenang badan² Pemerintahan. Hal ini ditambah lagi dengan berlakunja wewenang militer dalam keadaan bahaja jang setjara mendalam masuk ke-sektor² ekonomi.

Kongres sependapat dengan Laporan jang menegaskan bahwa *pendemokrasian* dalam pelaksanaan pembangunan belum didjalankan sehingga *pengawasan jang intensif dari bawah, jaitu dari massa, dan dari atas, jaitu dari badan² pemerintahan jang berwenang belum terdjamin;* bahwa sjarat penting lagi untuk berhasilnja pembangunan nasional adalah antusiasme Rakjat pekerdja terhadap pembangunan dengan memenuhi sjarat materiil jang diperlukan; dan bahwa mempertinggi produksi beras didalam negeri dalam rangka merealisasi rentjana memenuhi swasembada akan kebutuhan beras, sesuai dengan

ketetapan MPRS, hanja dapat ditjapai dengan berorientasi kepada kaum tani dan menjediakan sjarat² materiil untuk mendjamin meningkatnja daja produksi kaum tani.

Berbitjara mengenai masalah kepadatan penduduk jang djuga kini sering didjadikan alasan daripada kemelaratan, Laporan menegaskan bahwa masalah ini tidak dapat dipetjahkan hanja dengan djalan transmigrasi tjara lama, tetapi harus dikombinasikan dengan pembangunan industri, pembukaan projek² pertanian, perikanan dan peternakan, projek² pertambangan dengan djaminan hakmilik tanah sesuai dengan PPPA, dengan melaksanakan UUPBH dan peraturan lain jang menguntungkan kaum tani penggarap, terutama buruhtani dan tanimiskin.

Mengenai masalah pembiajaan, Laporan mengingatkan bahwa Manipol telah menandaskan perlunja mengerahkan semua tenaga dan dana (funds and forces) untuk mengatasi pembiajaan sekarang, jang harus ditjapai dengan menempuh djalan revolusioner.

Berhubung dengan itu, Kongres memperkuat penegasan *bahwa tanpa meringankan beban penghidupan Rakjat jang terus bertambah berat sekarang, tanpa tindakan² tegas terhadap kaum kapitalis birokrat atau pentjoleng, tanpa kordinasi jang efektif dan kontrol masjarakat serta tanpa melawan imperialisme dibidang ekonomi, tidaklah mungkin tertjapai maksud untuk membangkitkan antusiasme Rakjat, tidaklah mungkin memperoleh dukungan masjarakat terhadap Plan 8 Tahun.*

Laporan selandjutnja menundjukkan bahwa *pada hakekatnja sumber kematjetan² dalam pelaksanaan Plan 8 Tahun terletak pada kekuasaan politik dipusat sampai ke-daerah²*, dan bahwa oleh karena itu retuling dibidang politik dan ekonomi, pendemokrasian dalam pelaksanaan pembangunan dengan membentuk Dewan² Perusahaan, Dewan² Produksi Pertanian, Dewan² Pengawas Distribusi dan Dewan² Pembangunan Daerah dengan mengikutsertakan wakil² organisasi² Rakjat, stabilisasi ekonomi dengan mentjegah kemunduran² produksi dan kenaik-

an[2] harga serta memperbaiki dajabeli Rakjat, pentjegahan pensalahgunaan kekuasaan karena masih berlakunja keadaan bahaja, adalah sjarat[2] pokok untuk dapat mensukseskan pelaksanaan Plan 8 Tahun.

II

1. *Imperialisme Makin Sekarat*

Berbitjara mengenai situasi internasional, Laporan menjimpulkan bahwa proses kedjadian[2] didunia menundjukkan bahwa imperialisme makin sekarat dan perdjuangan melawan imperialisme makin tadjam dan sengit, dan bahwa tugas politik jang pokok dewasa ini jalah mengalahkan perlawanan[2] imperialisme dalam proses keruntuhannja terhadap perkembangan dan kemadjuan Sosialisme. Perlawanan[2] ini datang terutama sekali dari imperialis Amerkia Serikat, negara imperialis jang paling kuat tetapi djuga jang mempunjai paling banjak musuh didunia.

Mengenai pengaruh kubu Sosialis, Laporan menundjukkan bahwa kedjadian[2] dan situasi internasional dewasa ini djelas membuktikan bahwa tidak ada masalah internasional jang dapat diselesaikan tanpa ikutsertanja kubu Sosialis, dan bahwa pembangunan Komunisme di Uni Sovjet mempunjai pengaruh internasional jang amat luas.

Kongres sependapat dengan Laporan, bahwa ekonomi perang Amerika Serikat merupakan sumber utama dari politik imperialis untuk mengobarkan perang nuklir dan bahwa politik pemerintah Kennedy sekarang bukan hanja tidak berbeda dengan dimasa Eisenhower, tetapi malahan lebih agresif dan lebih djahat. Kelitjikan Pemerintah Partai Demokrat Amerika Serikat jalah bahwa disamping politik perangnja jang agresif itu, ia djuga mengadakan apa jang dinamakan „strategi perdamaian" dengan maksud untuk mendapat lebih banjak waktu serta

kesempatan guna memperbaiki kembali prestise Amerika Serikat jang sudah djatuh itu karena politik Eisenhower-Dulles dulu. Tetapi penolakan Presiden Kennedy terhadap usul Uni Sovjet agar Konferensi Perlutjutan Sendjata 18 Negara di Djenewa jang bertingkat Menlu didjadikan Konferensi Tingkat Tertinggi menundjukkan dengan terang apa sebenarnja „strategi perdamaian" Amerika Serikat itu.

Dalam menghadapi kelitjikan Amerika Serikat dan imperialis lainnja, Laporan menegaskan bahwa politik jang paling tepat adalah mendjawab dengan setimpal semua tindakan²nja; berunding didjawab dengan berunding dan kekerasan dilawan dengan kekerasan.

Dalam hubungan melandjutkan politik mempersatukan semua kekuatan revolusioner jang melawan penindasan dan penghisapan imperialisme, Kongres sependapat dengan Laporan bahwa penjelenggaraan Konferensi ke-II Asia-Afrika jang diperluas dengan negara² Amerika Latin harus tetap mendjadi pemikiran, dan bahwa Indonesia dengan martabat internasionalnja jang tjukup baik dewasa ini mempunjai sjarat² jang diperlukan guna bertindak sebagai pendorong bagi terlaksananja Konferensi Asia-Afrika-Amerika Latin.

2. *Perlawanan Menentang Neo-Kolonialisme di Asia, Afrika dan Amerika Latin*

Kongres menganggap penting sekali kesimpulan jang mengatakan bahwa beberapa kedjadian di Asia, terutama di-negeri² tetangga kita perlu mendapat perhatian istimewa dari Pemerintah dan Rakjat Indonesia, chususnja karena adanja berbagai bentuk neo-kolonialisme jang harus dilawan.

Di Afrika, tjontoh neo-kolonialisme jang paling kurangadjar jalah praktek Amerika Serikat di Konggo, negeri pahlawan besar Patrice Lumumba, dimana kaum neo-kolonialis Amerika Serikat, dengan menggunakan sampah² masjarakat Konggo seperti Tsombe, Mobutu

dan Kasavubu serta dengan menggunakan nama PBB, berusaha menjingkirkan saingan²nja jaitu kaum imperialis Belgia dan Inggris guna dapat mengeduk kekajaan alam jang kaja dari Konggo.

Oleh karena itu Kongres merasa perlu menggaris-bawahi peringatan didalam Laporan *bahwa kedjadian² di Konggo ini membuktikan betapa kaum imperialis Amerika Serikat masih dapat mensalahgunakan organisasi PBB untuk maksud² neo-kolonialnja, seperti di Korea beberapa tahun jang lalu, hal mana hendaknja selalu mendjadi perhatian serta kewaspadaan kita dalam menghadapi tawaran „djasa² baik" Amerika Serikat dan PBB untuk menjelesaikan masalah Irian Barat.*

Kongres dengan gembira mentjatat bahwa dalam perdjuangan melawan neo-kolonialisme peranan penting telah dimainkan oleh organisasi² Rakjat Asia-Afrika-Amerika Latin. Kongres memberi salut jang se-tinggi²nja kepada Rakjat Aldjazair jang gagah perwira dan berkat perdjuangannja, berkat bantuan serta sokongan moril dan materiil dari seluruh dunia progresif, kaum patriot Aldjazair dapat memaksa pemerintah de Gaulle untuk mengadakan gentjatan sendjata. Djuga gerakan kemerdekaan Siria jang bersendi pada persatuan nasional jang luas dengan tjepat telah berhasil membebaskan Siria dari „Mesirisasi".

Tetapi disamping itu, Laporan menundjukkan perlunja memperhatikan peranan kaum komprador di-negeri² tetangga kita, jang oleh kaum imperialis di-tondjol²kan, disadjikan serta di-tawar²kan sebagai tokoh² „nasional". Perdana Menteri Tengku Abdulrachman dari Malaja dewasa ini sedang giat mengusahakan pembentukan Malaysia, federasi jang akan meliputi Malaja, Singapura, Serawak, Sabah dan Brunai, jang bukan sadja akan membantu Inggris dalam mempertahankan kekuasaan kolonialnja atas Rakjat di-negeri² itu, tetapi djuga untuk memegang peranan jang berpengaruh di Asia Tenggara seperti jang hendak ditjobanja melalui projek ASA (Association of South-east Asia). Di Vietnam Selatan kega-

galan total Ngo Din Diem mendekati kenjataan, walaupun dibantu oleh segala djenderal dari Pentagon (Kementerian Pertahanan Amerika Serikat). Situasi di Vietnam Selatan dan Laos sekarang ini membuktikan dengan djelas betapa berbahajanja kenekadan dari kekuatan² lama jang masih bertjokol jang dikepalai oleh Amerika Serikat untuk menindas perdjuangan pembebasan Rakjat² Asia Tenggara. Di Laos bentrokan antara kekuatan² lama jang bertjokol dengan kekuatan² baru jang menentang disetnja negeri mereka kedalam Pakta SEATO dan jang ingin melihat direalisasinja persetudjuan² Zürich dan Hin Hop.

Dalam hubungan politik tetangga baik, Kongres memperkuat Laporan jang menjimpulkan bahwa „politik tetangga baik" tidak boleh hanja berarti Republik Indonesia bersikap baik terhadap tetangga²nja, tetapi djuga tetangga² harus baik terhadap Republik Indonesia. Djika ada tetangga bersikap buruk terhadap Republik Indonesia, Republik Indonesia pun wadjib menentukan sikap jang setimpal dan korektif.

Adalah tepat bahwa Laporan memperingatkan Pemerintah Indonesia supaja memiliki kewaspadaan terhadap Djepang jang bersama dengan Amerika Serikat dan imperialis² lainnja telah berkomplot dengan Belanda untuk mempertahankan kekuasaan kolonialnja di Irian Barat, dan bahwa SEATO merupakan suatu pusat jang menarik bagi kekuatan² jang paling reaksioner di-negeri² Asia Tenggara ini termasuk Indonesia.

Mengenai Amerika Latin, Laporan menundjukkan bahwa disana Amerika Serikat melantjarkan rentjana neo-kolonialnja jang diberi nama „Persekutuan untuk Kemadjuan" (Alianza para Progreso), jang mendapat perlawanan begitu sengit dari Rakjat Amerika Latin seperti belum pernah terdjadi dalam sedjarah. Djuga ke-

gagalan Amerika Serikat dalam Konferensi Punta del Este untuk menarik negeri² Amerika Latin kefihaknja dalam menghadapi Kuba jang heroik, jang merupakan negara bebas jang pertama di Amerika Latin dan jang dewasa ini sedang menempuh djalan pembangunan Sosialis, menundjukkan dengan djelas bahwa kedudukan Amerika Serikat di „pekarangan belakangnja" djauh daripada kokoh dan stabil.

3. *Kontradiksi Meruntjing Dikalangan Imperialis*

Dengan tepat Laporan menundjukkan bahwa makin melemahnja kubu imperialis tidak hanja ditandai oleh kegagalan²nja di Asia, Afrika dan Amerika Latin, tetapi djuga oleh menadjamnja kontradiksi² dalam kubu imperialis sendiri jang telah mempertjepat proses keruntuhannja. Kanada, jang biasanja dianggap oleh Amerika Serikat sebagai „kepunjaannja sendiri", sebagai partner jang kesetiaannja tak dapat diragukan mulai menentang Amerika Serikat setjara terang²an dengan tidak menghentikan perdagangannja dengan Kuba, walaupun dilarang oleh Amerika Serikat, dan dengan ditolaknja penjimpanan kepala peluru² nuklir (nuclear warheads) Amerika Serikat di Kanada. Di Eropa Barat, Inggris jang ber-abad² memainkan peranan pertama di Eropa makin tidak senang terhadap Amerika Serikat jang mendjagoi kaum imperialis-militeris Djerman Barat. Djuga de Gaulle jang merindukan kembalinja „kebesaran" Perantjis dimasa-silam berusaha keras untuk merebut tempat pertama di Eropa Barat, sedang Djerman Barat difihak lain berusaha keras supaja Pakta NATO didjadikan „kekuatan nuklir ke-4" jang berarti memaksa Inggris dan Perantjis melepaskan pengawasan mereka terhadap sendjata² nuklir untuk diserahkan kepada pimpinan NATO jang untuk sebagian besar dikuasai oleh djenderal² bekas Nazi Hitler.

Laporan menjimpulkan bahwa kedudukan kaum imperialis dunia jang dikepalai oleh Amerika Serikat di-mana²

merosot dan melemah, sedangkan gerakan revolusioner Rakjat dan Partai² Komunis madju terus dan makin lama makin penting peranan politiknja.

4. *Tidak Boleh Ada Dualisme*

Kongres membenarkan kesimpulan bahwa kalau Indonesia sekarang dihormati oleh bangsa², maka hal itu adalah karena politiknja jang anti-imperialis dan tjinta-damai, tidak non-committed dan tidak anti-kubu Sosialis tetapi ber-sama² negara² Sosialis melawan imperialisme dan kolonialisme.

Dalam hubungan ini, Laporan menundjukkan bahwa konsepsi tentang „kekuatan² baru jang tumbuh" melawan „kekuatan² lama jang bertjokol" jang dilahirkan oleh Republik Indonesia merupakan suatu hasil atau prestasi jang sangat penting dalam perkembangan politik luarnegeri Republik Indonesia sesudah Kongres Nasional ke-VI.

Selandjutnja Laporan menundjukkan bahwa politik luarnegeri Republik Indonesia sekarang sudah tjukup djelas dan objektif dirumuskan oleh Presiden, antara lain dan terutama dalam pidato *Membangun Dunia Kembali* dan pidato dalam Konferensi Negara² Non-Blok.

Kongres memperkuat Laporan jang menekankan bahwa soalnja sekarang jalah pelaksanaannja, atau lebih kongkrit lagi: aparat² pelaksanaannja. Kenjataan bahwa misalnja sampai kini belum djuga diangkat dutabesar Republik Indonesia untuk Kuba, belum diadakan hubungan² diplomatik dengan Republik Demokrasi Vietnam, Republik Rakjat Demokratis Korea dan dengan Republik Demokrasi Djerman, sedangkan dibidang olahraga Republik Indonesia masih berhubungan normal dengan Taiwan, dan kenjataan² lain lagi, menundjukkan bahwa dalam pelaksanaan politik luarnegeri Republik Indonesia belum sepenuhnja sesuai dengan jang sudah digariskan.

Adalah kewadjiban tiap² patriot Indonesia untuk men-

djaga agar supaja ada kesatuan antara rumus dan pelaksanaan politik luarnegeri, mendjaga djangan sampai timbul dualisme antara konsepsi politik jang dirumuskan dengan pelaksanaannja dalam praktek, agar Manipol berdjalan sepenuhnja dalam politik luarnegeri Republik kita.

5. *PKI dan Gerakan Komunis Internasional*

Kongres memperkuat Laporan jang menjimpulkan bahwa Partai kita terus berusaha untuk lebih mengeratkan hubungannja dengan Partai² sekawan dan bahwa adanja perbedaan pendapat dalam gerakan Komunis Internasional terutama sedjak Kongres ke-22 PKUS pada achir tahun jang lalu bukan hanja tidak mengendorkan, malahan harus lebih mendorong kita untuk mempererat hubungan dengan Partai² sekawan, demi kepentingan klas buruh internasional dan demi kepentingan Rakjat Indonesia sendiri, karena tidak bisa disangkal bahwa jang mendjadi kekuatan inti daripada "the new emerging forces" dalam tiap² negeri adalah klas buruh dan Partainja.

Kongres sependapat dengan Laporan, bahwa perbedaan pendapat dalam gerakan Komunis internasional hanjalah gedjala sementara, sebab semua Partai Marxis-Leninis mempunjai tudjuan terachir jang sama, jaitu setjara revolusioner menghapuskan penghisapan atas manusia oleh manusia, mentjiptakan dunia baru, dunia Sosialis dan Komunis, dimana semua manusia hidup damai dan bahagia.

Laporan menundjukkan bahwa dasar untuk persatuan Komunis sedunia adalah sangat kuat, karena disamping teori Marxisme-Leninisme, kita sudah mempunjai Deklarasi 1957 jang sudah disempurnakan oleh Pernjataan 1960.

Mengenai hubungan antara Partai² sekawan, Kongres sepenuhnja menjetudjui penekanan didalam Laporan bahwa jang berlaku sebagai dokumen² internasional, platform buat semua Partai Komunis, hanjalah dokumen²

jang dilahirkan oleh gerakan Komunis internasional, pada waktu sekarang jalah Deklarasi Komunis 1957 dan Pernjataan Komunis 1960. Dokumen sesuatu Partai, walaupun mungkin mempunjai arti penting bagi sebagian atau semua Partai Komunis dan Buruh, bukanlah platform buat semua Partai.

Kongres jakin bahwa dengan berpegang pada Deklarasi dan Pernjataan, keretakan jang ada dalam gerakan Komunis sedunia sekarang dalam waktu jang tidak lama lagi akan dapat diatasi, dan kejakinan ini diperkuat oleh kenjataan bahwa *semua penandatangan Deklarasi dan Pernjataan sampai sekarang menjatakan dirinja tetap setia pada dua dokumen tersebut.*

Adalah sepenuhnja sesuai dengan Marxisme-Leninisme bahwa kita, kaum Komunis Indonesia, dalam mendjundjung tinggi prinsip² Marxisme-Leninisme, harus setjara kreatif menentukan politik, taktik, bentuk perdjuangan dan bentuk organisasi Partai berdasarkan keadaan kongkrit dinegeri kita, dan bahwa Marxisme-Leninisme kita adalah Marxisme-Leninisme jang ditrapkan di Indonesia, jang di-Indonesia-kan, jang tidak dogmatis tetapi kreatif. Ini berarti bahwa Partai kita adalah bebas dan mempunjai hak-sama, menentukan politik²nja sendiri berdasarkan sjarat² jang kongkrit dinegeri kita, dan saling menjokong dengan Partai² Marxis-Leninis jang lain. Partai kita bertanggungdjawab kepada klas buruh dan Rakjat pekerdja Indonesia, kepada seluruh gerakan klas buruh dan Komunis sedunia.

II

1. *Madju Terus Untuk Memenuhi Djatah Plan 3 Tahun Kedua*

Kongres membenarkan kesimpulan didalam Laporan, bahwa Kongres Nasional ke-VI telah memberikan petundjuk jang djelas, sangat mendjiwai dan bersifat memobi-

lisasi dalam kita melakukan tugas² meneruskan pembangunan Partai, jang pelaksanaannja kemudian telah dirumuskan setjara terperintji dalam Plan 3 Tahun ke-II tentang Pendidikan dan Organisasi, dengan tekanan pada Pendidikan.

Laporan menundjukkan bahwa sebagaimana halnja dengan pelaksanaan Plan 3 Tahun Pertama, pelaksanaan Plan 3 Tahun Kedua ini djuga mengalami banjak rintangan, terutama dari fihak para penderita Komunisto-phobi, baik dipusat maupun di-daerah². Pendeknja, sedjak Kongres Nasional ke-VI hingga sekarang pukulan ber-tubi² telah ditudjukan kepada tubuh Partai kita. Berhubung itu Kongres menganggap tepat sekali kesimpulan, bahwa djikalau ada prestasi jang paling besar daripada gerakan revolusioner dan demokratis selama masa jang ditindjau sekarang, maka hal itu jalah : PKI *tetap tegap dan makin besar!*

Tetapi Kongres djuga membenarkan Laporan jang menundjukkan, bahwa selama masih ada kaum reaksioner, selama itu pula PKI akan mendapat gangguan² dan pukulan² dan bahwa oleh karena itu kita kaum Komunis harus setiap saat siap untuk menghadapi gangguan dan pukulan kaum reaksioner ada kalanja gangguan dan pukulan ringan dan ada kalanja pula berat. Laporan menegaskan bahwa dalam menghadapi kaum reaksioner jang berkepala batu kita harus melaksanakan *Lima Lebih*: lebih *berani*, lebih *pandai*, lebih *waspada*, lebih *gigih* dan lebih *tekun*.

Kongres membenarkan Laporan jang menjimpulkan bahwa walaupun banjak kesulitan, Plan 3 Tahun Kedua pada pokoknja berdjalan baik dan bahwa kita daripadanja telah memetik hasil² jang penting. Akibat daripada lebih intensifnja pendidikan Marxisme-Leninisme didalam Partai dan diratakannja peladjaran filsafat, telah sangat memperkuat ideologi dan disiplin Partai dan ini telah lebih memungkinkan untuk mentjegah penjelewengan² dari garis massa dilapangan politik, untuk melawan ketjenderungan² menempatkan kepentingan diri

diatas kepentingan Rakjat dan Partai, untuk lebih memperkuat persatuan didalam Partai dengan berkurangnja kontradiksi² didalam Comite² Partai jang bersumber pada perbedaan pandangan mengenai politik. Djuga garis politik front nasional makin meresap difahami kader² Partai, keluwesan (flexibelitet) jang tinggi dalam memperdjuangkan pandangan dan pendirian² revolusioner dan dalam mendjaga kebebasan Partai. Diseluruh tubuh Partai kita telah terdapat antusiasme beladjar teori dikalangan kader², dan Partai telah mempunjai barisan kader² jang berteori, baik dipusat maupun di-daerah². Laporan menundjukkan bahwa adanja barisan kader jang berteori ini merupakan pelengkap jang penting bagi Comite², baik Comite Central maupun Comite Daerah Besar, sehingga Comite², dalam hal ini Dewan Hariannja, mempunjai dua tangan jang sangat diperlukan, jaitu: *Sekretariat Comite dan barisan kader jang berteori.*

Dalam hubungan dengan usaha memperhebat pendidikan Marxisme-Leninisme didalam Partai, Kongres memperkuat Laporan jang menekankan bahwa jang harus segera mendapat pemetjahan jalah *tenaga guru*, dengan djalan lebih banjak mengadakan Sekolah² Guru oleh semua tingkat Comite jang bersangkutan; dan masih kurangnja *diktat peladjaran*, dengan djalan memetjahkan soal pentjetakannja.

Mengenai kekurangan dalam melaksanakan Plan, Laporan menundjukkan bahwa kekurangan kita jang penting jalah kekurangmampuan dan kekurangtjakapan dalam menghubungkan satu soal dengan soal lain dan untuk melaksanakan banjak pekerdjaan dalam waktu jang sama (serempak, simultan). Dalam hubungan ini ditegaskan bahwa untuk meningkatkan kemampuan diperlukan pimpinan dan kontrole jang terus-menerus dan bahwa kompetisi pelaksanaan Plan harus dipadukan dengan membantu organisasi dan Comite jang lemah, harus dengan mengadakan gerakan² pendek pada waktu² tertentu dan dengan berpegang pada garis „turun kebawah membantu organisasi bawahan".

Kongres menganggap tepat bahwa Laporan sekali lagi menekankan pentingnja berpegang teguh pada metode memimpin jang dirangkaikan dengan langgam kerdja jang tepat seperti jang digariskan Kongres ke-VI, jaitu memadukan pimpinan dengan massa, dan dari sini menarik kesimpulan bahwa adalah sangat penting tiap[2] daerah mempunjai *program kongkritnja sendiri* jang disusun berdasarkan kenjataan kongkrit setempat dan Program Tuntutan, serta didjiwai oleh Program Umum Partai.

Dalam usaha mentjapai atau melampaui djatah Plan 3 Tahun Kedua, Kongres memperkuat kesimpulan bahwa dalam tahun terachir Plan 3 Tahun ini kita harus mengadakan *Gerakan 4 Meningkat*: 1) Meningkat SP dan KR; 2) Meningkat anggota Partai dan Ormas; 3) Meningkat djumlah tjalon mendjadi anggota; 4) Meningkat pemasukan iuran; dan bahwa kuntji daripada kuntjinja jalah meratakan SP dan KR, jang berarti bahwa *Pendidikan* tetap mendjadi tekanan dalam tahun[2] terachir Plan 3 Tahun Kedua. Tetapi Gerakan 4 meningkat hanja mungkin sukses djika dilaksanakan dengan semangat kompetisi jang tinggi, melaksanakan *5 lebih* dan melaksanakan *3 baik: bekerdja baik, beladjar baik* dan *moral baik*.

Dalam hubungan melaksanakan *Gerakan 4 Meningkat*, Kongres menganggap tepat sekali kesimpulan Laporan jang mengatakan bahwa adalah penting untuk mengorganisasi barisan petugas[2], jang dikirim ke Comite[2] bawahan sampai ke Grup[2], dan bahwa untuk suksesnja Gerakan 4 Meningkat haruslah diaktifkan dan ditingkatkan kemampuan memimpin daripada CSS, dan bahwa oleh karena itu mendjadi sangat pentinglah soal memperhebat Sekolah[2] Partai Seksi dan Sekolah[2] Guru Seksi jang mendidik kader[2] dari CSS.

2. *Madju Terus Menempa Persatuan Partai Dengan Massa Rakjat*

Kongres menganggap penting bahwa untuk memperbaiki pekerdjaan massa daripada Partai, Laporan sekali lagi mengingatkan pada Pedoman Kongres ke-VI *„berdjalan diatas dua kaki"*, jaitu supaja kita senantiasa mengkombinasikan pekerdjaan *ber-kobar*[2] dengan pekerdjaan *tekun*, mengkombinasikan pekerdjaan mengobarkan semangat dengan pekerdjaan se-hari[2] jang praktis, mendalam dan teliti, meliputi bidang[2] organisasi, pendidikan, politik, dan ideologi.

Laporan menjimpulkan bahwa pelaksanaan daripada pedoman ini masih belum seimbang, karena pekerdjaan tekun pada umumnja belum tjukup baik. Oleh karena itu di-masa[2] datang kita harus memberikan lebih kuat tekanan pada pekerdjaan tekun dikalangan massa, harus mendidik dan melatih banjak kader untuk ini, harus mendjalankan politik penempatan kader jang lebih sesuai dalam rangka penjesuaian organisasi Partai dengan perkembangan situasi jang tjepat. Dalam hubungan ini, Laporan sekali lagi memperingatkan Comite[2] Partai jang belum dengan sungguh[2] melaksanakan *politik kader* dan *tjara mengurus kader* seperti jang diputuskan oleh Sidang Pleno ke-II CC bulan Desember 1960. Dengan berpegang teguh pada politik dan tjara mengurus kader ini, Comite[2] Partai dari semua tingkat, djuga kawan[2] jang bekerdja dalam Organisasi[2] massa, *harus lebih berani mengadakan promosi kader*. Tidak ada kader jang bodoh atau kader jang djelek, djika mereka dipimpin jang baik dan diperlakukan jang adil. Mereka adalah orang[2] revolusioner, jang masuk barisan revolusioner tanpa ada jang menjuruh apalagi jang memaksa. Mereka adalah anak[2] revolusi. Harus diberi tempat jang wadjar pada mereka dalam barisan revolusi.

Mengenai tugas untuk terus-menerus memperkuat kedudukan Partai dikalangan *kaum buruh* dan menarik bagian terbesar daripada massa kaum buruh kefihak

Partai, seperti jang telah digariskan oleh Kongres ke-VI, Kongres membenarkan kesimpulan bahwa tugas ini antara lain telah dilaksanakan dengan kegiatan^2 jang besar dari anggota^2 Partai dalam membela kepentingan^2 sosial-ekonomi kaum buruh. Disamping itu patut ditjatat bahwa hasil jang paling besar daripada perdjuangan gerakan serikatburuh Indonesia dalam tahun^2 belakangan ini ialah: *bertambah besarnja vaksentral revolusioner SOBSI dan gagalnja usaha untuk membubarkan vaksentral^2 jang ditjoba melalui OPPI dan PTK.* Sedang hasil^2 penting lainnja jalah dibentuknja Sekretariat Bersama Kerdjasama Vaksentral^2 dalam rangka pelaksanaan Trikomando Rakjat untuk membebaskan Irian Barat, dikeluarkannja Undang^2 Pembentukan Dewan^2 Perusahaan jang sekarang sedang dalam taraf perdjuangan untuk pelaksanaannja jang benar dan hasil^2 aksi^2 sosial-ekonomi jang banjak djumlahnja.

Mengingat di-waktu^2 jang akan datang kaum reaksioner akan terus berusaha untuk menimpakan beban krisis dan inflasi sekarang sepenuhnja diatas pundak Rakjat pekerdja, terutama kaum buruh dan kaum tani. Kongres memperkuat kesimpulan bahwa kaum buruh Indonesia harus mendjadi kampiun dan teladan dalam dua matjam perdjuangan. *Pertama,* dalam perdjuangan untuk melawan pembebasan setjara berat sebelah daripada akibat inflasi dan krisis ekonomi; *kedua,* dalam perdjuangan untuk pengubahan demokratis dilapangan sistim politik dan dilapangan kebebasan politik bagi Rakjat. Disamping itu kaum buruh Indonesia, sesuai dengan tradisinja, harus mengibarkan tinggi^2 bendera patriotisme, harus tetap mendjadi pedjuang jang gigih dalam memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia dan dalam meningkatkan produksi di-perusahaan^2 Negara serta mentjegah kebangkrutan perusahaan^2 swasta patriotik. Djuga kaum buruh Indonesia harus tetap berdiri dibarisan depan dalam urusan^2 persahabatan antara bangsa^2, dalam melikwidasi kolonialisme dari permukaan bumi dan dalam membela perdamaian dunia.

* * *

Mengenai pekerdjaan dikalangan *kaum tani,* Kongres menjetudjui kesimpulan bahwa selama masa jang ditindjau telah ditjapai kemadjuan² penting dalam pekerdjaan dikalangan kaum tani, terutama disebabkan karena kader² Partai sudah makin banjak jang mengadakan penelitian di-desa², jang membantu mengorganisasi kaum tani, melahirkan dan mendidik kader² dikalangan kaum tani sendiri. Kemadjuan² ini telah memungkinkan organisasi tani revolusioner, jaitu BTI jang sekarang beranggota 4½ djuta, berkembang luas dalam melaksanakan tuntutan² jang sangat aktuil seperti tuntutan pelaksanaan Undang² Perdjandjian Bagi Hasil dan Undang² Pokok Agraria, tuntutan supaja menurunkan harga kebutuhan hidup se-hari², tuntutan perluasan hak² demokrasi, pentjabutan keadaan bahaja dan pemulihan keamanan, serta tuntutan untuk meringankan beban penghidupan kaum tani jang sampai batas² tertentu telah berhasil.

Kongres membenarkan kesimpulan Konferensi Nasional Tani ke-II PKI dalam bulan Djuli 1961, jaitu bahwa „gerakan tani melawan berbagai bentuk penghisapan tuantanah dan lintahdarat sedang berkembang dan mulai meluas diseluruh negeri". Kongres mentjatat dengan gembira bahwa pada waktu² belakangan ini gerakan tani djuga telah berkembang dibagian Timur dari negeri kita.

Laporan menundjukkan bahwa djuga telah terdapat kemadjuan² penting mengenai Gerakan 6 baik (turun sewa tanah, turun bunga uang jang dipindjam, naik upah buruh tani, naik produksi pertanian, naik tingkat kebudajaan kaum tani, naik tingkat kesedaran politik kaum tani), dimana termasuk didalamnja gerakan 1001 untuk meningkatkan produksi bahan makanan.

Kongres menggarisbawahi penekanan dalam Laporan, bahwa dalam melaksanakan Gerakan 6 baik dan Gerakan 1001 harus diutamakan kepentingan buruhtani dan tanimiskin dengan tidak mengabaikan tanisedang jang djuga merupakan tenaga penggerak revolusi jang penting. Untuk mendjamin ini, ormas tani revolusioner harus didjadi-

kan ormas jang bersih dari tuantanah dan tani kaja dan jang keanggotaannja terutama terdiri dari buruhtani dan tanimiskin, sedangkan tanisedang terutama dihimpun dalam koperasi² Rakjat pekerdja jang berhubungan erat dengan ormas tani revolusioner dalam perdjuangan melawan tuantanah dan lintahdarat.

* * *

Kongres menjambut dengan gembira kesimpulan bahwa bersamaan dengan madjunja gerakan revolusioner dan progresif selama masa jang ditindjau, kitapun telah mentjatat kemadjuan² penting dalam gerakan *pemuda, mahasiswa* dan *peladjar*. Semangat revolusioner dikalangan muda meningkat tinggi terutama setelah Trikomando Rakjat Pembebasan Irian Barat. Front Pemuda makin terkonsolidasi, kerdjasama dikalangan organisasi² mahasiswa makin baik dan semangat patriotik dan revolusioner dikalangan peladjar² sekolah menengah meningkat dengan tjepat. Organisasi² revolusioner daripada mahasiswa dan peladjar² sudah bekerdja kedjurusan meningkatkan prestasi beladjar, dan berolahraga, sudah merupakan potensi dalam melawan kegiatan² subversif dan reaksioner di-sekolah² dan Universitas², dan dalam mentjiptakan orang² jang terpeladjar jang Manipolis.

Kongres djuga bergembira dengan kenjataan bahwa delegasi² pemuda dan peladjar Indonesia ke-pertemuan² Internasional pada tahun² belakangan ini, baik jang diselenggarakan didunia Barat maupun di Timur, selalu menampakkan diri sebagai delegasi jang kompak bersatu dan jang tegas membela serta memperdjuangkan prinsip² Manipol dan berdiri difihak "the new emerging forces" dan bahwa djuga peladjar² Indonesia di luarnegeri tidak mau ketinggalan dalam pelaksanaan Trikomando Rakjat.

Mengenai Pemuda Rakjat, Kongres dengan rasa puas menjambut kesimpulan bahwa dibawah sembojan: *„Djadikan Pemuda Rakjat Organisasi jang besar dan terkonsolidasi"*, telah dilakukan kegiatan² jang besar oleh kader²

Pemuda Rakjat untuk meluaskan organisasi dan keanggotaannja serta untuk mendidik barisannja dalam semangat Marxisme-Leninisme. Dalam rangka Trikomando Rakjat, Pemuda Rakjat berdiri dibarisan depan dalam melaksanakan tekad perdjuangan Rakjat: *„Satu tangan pegang bedil dan satu tangan lagi pegang patjul"*, artinja siap untuk kemedan perang guna membebaskan Irian Barat dan siap pula untuk memperkuat home-front (garis belakang).

Meskipun demikian, Kongres sependapat dengan Laporan bahwa tugas jang dihadapi oleh gerakan progresif di-masa² datang adalah djauh lebih banjak dan lebih berat dan bahwa oleh karena itu kader² Pemuda Rakjat harus lebih tekun dan lebih bersemangat untuk membikin organisasinja tersebar diseluruh negeri, terkonsolidasi dibidang politik, organisasi dan ideologi, dan menarik lebih banjak pemuda buruh dan tani kedalam pimpinan Pemuda Rakjat serta meningkatkan keanggotaan wanita muda daripada Pemuda Rakjat.

* * *

Kongres djuga dengan rasa gembira menjambut bahwa selama masa jang ditindjau *gerakan wanita* telah mentjapai kemadjuan² penting sebagai jang dikemukakan didalam Laporan. Front persatuan Wanita anti-imperialisme jang luas telah tergalang dipusat, sedang di-daerah² kerdjasama itu harus mendapat perhatian jang lebih besar.

Laporan menundjukkan bahwa dalam tahun² belakangan ini ormas wanita revolusioner mengalami kemadjuan² penting, baik dalam perluasan organisasi dan anggotanja maupun dalam konsolidasinja dan bahwa perkembangan ini akan lebih baik lagi djika Comite² Partai di-daerah² memberi perhatian lebih besar kepada pengurus fraksi² dan kader² Partai jang bekerdja dalam ormas wanita revolusioner di-daerah². Ormas wanita revolusioner telah membuktikan militansinja dalam menun-

tut penurunan harga kebutuhan² hidup se-hari² dan dalam kegiatan² lain untuk meringankan kesulitan² rumahtangga.

Laporan menekankan bahwa kaum wanita harus setjara aktif ditarik kedalam Gerakan 6 baik, karena tanpa ini tidak akan ada gerakan massa jang luas di-desa². Dalam hubungan ini, Laporan menundjukkan pentingnja arti Seminar Nasional Wanita Tani jang diselenggarakan oleh Gerwani dalam bulan Desember 1960 dan Seminar Wanita Buruh jang diselenggarakan oleh SOBSI dalam bulan Mei 1961 jang telah merupakan bantuan jang besar kepada kader² wanita jang bekerdja didalam gerakan tani dan buruh. Untuk memperbaiki pekerdjaan dikalangan wanita muda, jang memang masih banjak kekurangannja, Laporan menundjukkan perlunja diadakan Seminar Nasional Wanita Muda, jang didahului oleh seminar² di-daerah².

Satu hal jang oleh Laporan dianggap belum sesuai dengan garis Kongres Nasional ke-VI jalah, bahwa walaupun keanggotaan Partai sudah meningkat dari 1,5 djuta mendjadi 2 djuta selama 2½ tahun ini, tetapi *prosentase* keanggotaan wanita didalam Partai bukan hanja tidak bertambah, malahan berkurang. Ini harus diperbaiki dengan lebih banjak menarik wanita pekerdja masuk Partai.

Kongres memperkuat Laporan jang menundjukkan bahwa masih banjak Comite Partai jang belum memberikan perhatian setjukupnja terhadap tugas: *„mendidik wanita² Komunis mendjadi wanita jang inteleknja, kemauannja dan perasaannja berkembang se-dalam²nja dan se-luas²nja"*.

* * *

Mengenai pekerdjaan dikalangan *kaum intelektuil*, Kongres sependapat dengan Laporan bahwa sangatlah penting arti daripada Sidang Pleno ke-III CC, jang menegaskan bahwa masalah kaum intelektuil bagi Partai

kita dalam tingkat perdjuangan sekarang berkisar pada persoalan: apa jang dapat disumbangkan oleh PKI untuk membantu inteligensia memperbesar peranannja didalam perdjuangan memenangkan Revolusi Indonesia sesuai dengan tradisi revolusioner tokoh² inteligensia Indonesia di-masa² jang lalu.

Meskipun pada waktu sekarang sembojan *„ilmu untuk ilmu"*, setjara politik pada pokoknja sudah dikalahkan oleh prinsip „ilmu untuk Rakjat", Laporan memperingatkan bahwa kita tidak boleh lengah, karena masih tjukup banjak sardjana jang dengan dalih „ilmu" sebagai kedok untuk melawan kemadjuan, melawan Rakjat, melawan Manipol, ja, melawan ilmu.

Kongres membenarkan konstatasi dalam Laporan bahwa perkembangan kekuatan progresif dan revolusioner, kekuatan persatuan nasional dengan mertjusuar Manipol makin lama makin besar pengaruhnja atas kaum intelektuil Indonesia, membuka kemungkinan baru untuk lebih memperbesar peranan kaum intelektuil dalam perdjuangan memenangkan revolusi nasional dan demokratis jang berharidepan Sosialisme.

Kongres memperkuat kesimpulan Laporan bahwa pekerdjaan Partai dikalangan kaum intelektuil mempunjai dua segi: *pertama*, pekerdjaan dikalangan inteligensia non-Partai, dan *kedua*, pekerdjaan melahirkan lebih banjak intelektuil Komunis. Dalam hubungan ini Partai kita sekarang sedang giat berusaha untuk dengan berangsur² melenjapkan kekurangan² jang terdapat pada dua pekerdjaan ini dengan djalan: disatu fihak membantu intelektuil revolusioner diluar Partai memadukan ilmu dengan praktek revolusi Indonesia serta memperkenalkan Marxisme-Leninisme kepada mereka; difihak lain meningkatkan taraf pengetahuan umum dan keahlian kader² Komunis serta kader² gerakan revolusioner pada umumnja serta lebih intensif lagi mengadjarkan kepada mereka prinsip fundamentil Marxisme-Leninisme, mendidik mereka tentang pendirian serta metode klas buruh.

Mengenai pekerdjaan Partai dilapangan kebudajaan, Kongres sepenuhnja membenarkan kesimpulan Laporan bahwa meskipun sembojan „seni untuk seni" sudah dikalahkan oleh prinsip „seni untuk Rakjat", kita dalam soal ini djuga tidak boleh lengah, karena kaum imperialis dan kaum reaksioner dalam negeri terus berusaha menghidup²kan prinsip jang setjara politik pada pokoknja sudah dikalahkan itu, dan bahwa perdjuangan untuk mengalahkan samasekali sembojan „seni untuk seni" akan berlangsung terus selama agresi kebudajaan imperialis jang dikepalai oleh Amerika Serikat, selama sisa² kolonialisme dan feodalisme belum dihapuskan samasekali oleh revolusi Indonesia.

Laporan menundjukkan bahwa berkat pimpinan Partai, Rakjat pekerdja telah dan sedang terus menggunakan kebudajaan sebagai sendjata perdjuangan dan bahwa kebudajaan jang digubah oleh perdjuangan Rakjat itu adalah kebudajaan nasional dan demokratis jang telah tumbuh dan semakin rindang.

Kongres dengan rasa puas mentjatat bahwa sedjak beberapa tahun belakangan ini, seniman² Komunis dan pekerdja² kebudajaan Partai, telah mentjiptakan banjak karja jang berbentuk kesusasteraan, senirupa, musik, drama, film dan tari sebagai dikemukakan didalam Laporan, dan bahwa pekerdja kebudajaan Partai telah bekerdjasama jang baik dengan seniman dan sastrawan² demokratis dan patriotik lainnja, sehingga tergalanglah suatu front kebudajaan anti-imperialis dan anti-feodal jang djika dipelihara dan dikembangkan terus akan merupakan kekuatan revolusi jang penting.

Djuga patut disambut dengan gembira gerakan mempopulerkan lagu² perdjuangan klas, lagu² nasional dan lagu² Rakjat daerah didalam barisan Partai maupun organisasi massa.

* * *

Achirnja Laporan mengingatkan bahwa Kongres Nasional ke-VI telah menetapkan program besar untuk kita

laksanakan, jaitu suatu program untuk memenangkan tuntutan² jang dimuat dalam Manipol, untuk memenangkan satu revolusi nasional-demokratis jang berharidepan Sosialisme. Djuga program tersebut telah memberikan tugas² internasional kepada Partai kita, tugas untuk mengalahkan kolonialisme dan imperialisme, untuk membela perdamaian dan menggalang persahabatan antara bangsa², antara Rakjat², antara klas buruh dan antara Partai² Komunis sedunia.

Laporan menekankan bahwa tiap² anggota Partai harus betul² mendjadi *teladan* dalam perdjuangan untuk demokrasi dan persatuan nasional, dalam menggempur imperialisme, terutama dalam perdjuangan pembebasan Irian Barat, dan dalam menggempur feodalisme. Kongres sepenuhnja membenarkan kesimpulan bahwa tugas² ini hanja mungkin kita laksanakan djika kita tidak henti²-nja menempa Partai kita, menempa organisasinja, politiknja, dan ideologinja, dan djika Partai kita tidak henti²-nja menempa persatuannja dengan massa Rakjat, djika Partai kita terus bekerdja dengan semangat patriotisme dan internasionalisme proletar jang terus meninggi.

Kongres Nasional Ke-III
(Luarbiasa) PKI

Djakarta, 29 April 1962

RESOLUSI TENTANG PERUBAHAN KONSTITUSI

Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) PKI jang dilangsungkan pada tanggal 25 s/d 30 April 1962 di Djakarta, setelah mendiskusikan Kata Pengantar Wakil Ketua I Partai, Kawan M.H. Lukman, tentang Perubahan Konstitusi (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga) PKI berhubung dengan ketentuan² Penpres No. 7/1959 dan Perpres No. 13/1960, dengan suara bulat memutuskan menerima perubahan² tersebut.

Kongres berseru kepada segenap anggota Partai, supaja mendjundjung tinggi dan mentaati serta mendjadikan Konstitusi (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga) Partai jang telah dirubah ini pegangan dalam mengatur kehidupan intern Partai dan dalam semua aktivitet melaksanakan politik Partai.

Kongres Nasional Ke-VII
(Luarbiasa) PKI

Djakarta, 29 April 1962

RESOLUSI TENTANG PERUBAHAN PROGRAM PKI

Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) PKI jang dilangsungkan pada tanggal 25 s/d 30 April 1962 di Djakarta, setelah mendiskusikan Kata Pengantar Wakil Ketua II Partai, Kawan Njoto, tentang Perubahan Program Partai berhubung dengan ketentuan2 Penpres No. 7/1959 dan Perpres No. 13/1960, dengan suara bulat memutuskan menerima perubahan2 tersebut.

Kongres berseru kepada segenap anggota Partai, supaja mendjadikan Program jang telah dirubah ini pegangan dalam melaksanakan semua aktivitet politik Partai.

Kongres Nasional Ke-VII
(Luarbiasa) PKI

Djakarta, 29 April 1962

RESOLUSI TENTANG LAPORAN KOMISI VERIFIKASI CENTRAL

Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) PKI jang dilangsungkan pada tanggal 25 s/d 30 April 1962 di Djakarta, setelah mendiskusikan laporan mengenai tugas pekerdjaan Komisi Verifikasi Central selama waktu antara Kongres Nasional ke-VI dan Kongres Nasional ke-VII

(Luarbiasa) sekarang, dengan suara bulat memutuskan menjetudjui sepenuhnja laporan Komisi Verifikasi Central tersebut.

Berdasarkan pengalaman selama ini, Kongres berseru kepada Comite² Partai di-daerah², supaja memberikan perhatian jang lebih banjak terhadap persoalan² sbb.:

1. Lebih mengaktifkan KV di-daerah².
2. Lebih mengintensifkan penarikan iuran dan sokongan serta penjetorannja kepada Comite² Partai jang berhak menerimanja.
3. Lebih meluaskan dan mengintensifkan pendidikan teori, politik dan pengetahuan umum bagi pekerdja² administrasi didalam Partai.
4. Lebih menjempurnakan pekerdjaan dibidang administrasi dan pembukuan keuangan.
5. Lebih baik lagi memelihara inventaris Partai.
6. Lebih mengintensifkan usaha² produktif Partai.
7. Lebih mengintensifkan pembajaran uang langganan HR dan penerbitan² Partai.

Kongres Nasional Ke-VII
(Luarbiasa) PKI

Djakarta, 29 April 1962

DENGAN BEDIL DAN PATJUL DITANGAN MEMBEBASKAN IRIAN BARAT DALAM TAHUN INI DJUGA

Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) PKI jang dilangsungkan pada tanggal 25 s/d 30 April 1962 di Djakarta, dalam mendiskusikan Laporan Umum Kawan Aidit telah memberikan perhatian chusus terhadap perdjuangan pembebasan Irian Barat.

Kenjataan² menundjukkan bahwa perdjuangan pembebasan Irian Barat dari tjengkeraman imperialis Belanda makin memuntjak. Trikomando Rakjat sudah diberikan oleh Presiden/Panglima Tertinggi pada tanggal 19 De-

sember 1961, pasukan² sukarela sudah mulai dikirim kedaerah perbatasan, pertempuran sendjata sudah terdjadi dan korban sudah ada jang djatuh, seperti antara lain dalam pertempuran dikepulauan Aru. Sementara itu, kaum kolonialis Belanda dengan bantuan imperialis Amerika Serikat dan imperialis lainnja terus memperkuat kekuatan militernja di Irian Barat.

Kongres berpendapat bahwa satu²nja djawaban jang tepat terhadap sikap kepalabatu Belanda ini jalah lebih memperhebat lagi konfrontasi kekuatan disegala bidang. Oleh karena itulah Kongres dengan suara bulat menjatakan dukungannja pada penegasan Presiden Sukarno dalam pidatonja di Medan pada tanggal 26 April 1962, bahwa fihak Indonesia tidak bersedia berunding dalam keadaan Belanda terus mengirimkan kekuatan² militernja ke Irian Barat dan bahwa Trikomando Rakjat berarti Irian Barat harus dibebaskan dengan segala djalan, terutama dengan konfrontasi kekuatan disegala bidang.

Dalam rangka memperhebat konfrontasi dibidang ekonomi, Kongres berpendapat bahwa sudah seharusnja Pemerintah sekarang djuga melaksanakan keputusan Musjawarah Pengurus Besar Front Nasional dengan partai² dan organisasi² massa tanggal 2 Maret jl. jang antara lain berbunji: *„apabila pemerintah Belanda tetap berkeras kepala, supaja Pemerintah Indonesia mensita semua modal Belanda jang ada di Indonesia"*. Sebab, akan merupakan satu kegandjilan kalau dalam keadaan makin memuntjaknja perdjuangan pembebasan Irian Barat, modal Belanda dalam perusahaan² tjampuran masih aman sadja menghisap Rakjat, menguras kekajaan alam Indonesia dan melakukan sabotase² ekonomi serta penipuan² terhadap Pemerintah.

Mengenai perundingan dengan fihak Belanda, Kongres berpendapat bahwa ini seharusnja dilakukan atas dasar *penjerahan kekuasaan Irian Barat kepada Republik Indonesia tanpa fihak ketiga, terbuka dan selama berunding itu Trikomando Rakjat harus terus berdjalan.* Penjerahan kekuasaan itu tidak boleh disertai sjarat pem-

berian hak² istimewa dibidang ekonomi kepada fihak Belanda, musuh bebujutan kita, maupun kepada Amerika Serikat, jang dalam sengketa Indonesia-Belanda berusaha menggantikan posisi ekonomi Belanda di Indonesia.

Untuk lebih memperhebat pelaksanaan Trikomando Rakjat, Kongres meminta perhatian Pemerintah supaja lebih mengintensifkan dan meluaskan latihan² militer bagi Rakjat, terutama pemuda² buruh, tani, mahasiswa dan peladjar. Djuga sukarelawan² jang telah mendaftarkan diri supaja segera mendapat latihan militer dan dipersendjatai. Sukarelawan² jang dikirim kegaris depan supaja hanja mereka jang telah mendapat latihan militer dan disamping itu djuga supaja diberi perlengkapan sesuai dengan keperluan pertempuran. Semuanja ini merupakan sjarat penting untuk tetap memelihara semangat bertempur jang tinggi dan mentjegah hal² jang tidak diinginkan.

Tetapi diatas se-gala²nja sjarat mutlak untuk suksesnja perdjuangan pembebasan Irian Barat jalah terdjaminnja *demokrasi* bagi Rakjat. Sebab dengan adanja demokrasi bagi Rakjat, dan tidak bagi musuh² Rakjat, maka akan dapat lebih diperkuat *persatuan nasional* anti-imperialis jang berporoskan Nasakom, dan akan dapat *dimobilisasi* segenap potensi nasional.

Oleh karena itu Kongres berseru supaja perdjuangan pembebasan Irian Barat dilakukan dengan mengibarkan tinggi² pandji² bangsa dan dengan tekad: *satu tangan pegang bedil dan satu tangan lagi pegang patjul.* Ini berarti: *siap untuk dikirim kegaris depan dan siap pula memperkuat garis belakang.* Chusus kepada segenap anggota Partai dan pentjipta²nja. Kongres menjerukan untuk dengan atau tanpa bantuan Pemerintah lebih hebat lagi melaksanakan *Gerakan 1001* guna meningkatkan produksi bahan makanan. Ini berarti tangan jang memegang patjul memperkuat tangan jang memegang bedil.

Kongres dengan perasaan gembira menjambut bahwa dalam perdjuangan pembebasan Irian Barat, Partai telah berhasil menghimpun sokongan dari Partai² Komunis

dan Buruh dari 5 benua. Djuga sangat menggembirakan bahwa organisasi² massa revolusioner Rakjat telah berhasil menarik simpati dan sokongan organisasi² massa internasional jang progresif pada perdjuangan pembebasan Irian Barat.

Oleh karena itu adalah pada tempatnja, bahwa Kongres menjampaikan salut jang se-tinggi²nja kepada Partai Komunis dan klas buruh Nederland, kepada Partai Komunis dan klas buruh Djepang, kepada Partai Komunis dan klas buruh Australia serta Partai² Komunis dan klas buruh negeri² lain jang dengan tulus ichlas dan militan telah menjatakan solidaritet dan bantuannja kepada Rakjat Indonesia dalam perdjuangannja mengusir kolonialisme Belanda di Irian Barat. Semuanja ini membuktikan betapa satunja perdjuangan Rakjat Indonesia dengan perdjuangan Rakjat progresif seluruh dunia dan oleh karenanja lebih memperkuat tekad Rakjat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari tjengkeraman kolonialisme Belanda dalam tahun ini djuga dengan segala djalan, terutama dengan konfrontasi kekuatan disegala bidang.

Kongres Nasional Ke-VII
(Luarbiasa) PKI

Djakarta, 29 April 1962

DJAMIN DEMOKRASI BAGI RAKJAT UNTUK PERKUAT PERSATUAN DAN MOBILISASI !

Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) PKI jang dilangsungkan pada tanggal 25 s/d 30 April 1962 di Djakarta sepenuhnja membenarkan Laporan Kawan Aidit, jang dalam menganalisa situasi politik dan ekonomi dalamnegeri telah menjimpulkan, bahwa sjarat mutlak untuk suksesnja perdjuangan pembebasan Irian Barat, mengatasi krisis sandangpangan dan melantjarkan pelak-

sanaan Pola Pembangunan 8 Tahun adalah didjaminnja *demokrasi* bagi Rakjat. Sebab hanja dengan adanja demokrasi bagi Rakjat, dan tidak bagi musuh² Rakjat, *persatuan nasional* anti-imperialis jang berporoskan Nasakom dapat lebih diperkuat dan segenap potensi nasional dapat dimobilisasi.

Ini sesuai dengan isi dan semangat Amanat Presiden Sukarno pada tanggal 16 Desember 1959 jang dengan tegas mengatakan bahwa pelaksanaan keadaan perang tidak boleh mengabaikan unsur musjawarah sebagai salahsatu azas dan tjiri daripada Demokrasi Terpimpin. tidak dimaksudkan untuk meletakkan penguasaan keadaan kedalam tangan militer dan supaja bisa berdjalan dengan sedikit mungkin gangguan kepada demokrasi dan kepada rasa hati Rakjat djelata.

Tetapi dengan rasa pedih Kongres mentjatat banjaknja kenjataan² jang tidak seirama dengan Amanat Presiden tersebut. Dibeberapa daerah keadaan bahaja telah disalahgunakan oleh unsur² jang tidak bertanggungdjawab untuk mematjetkan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan Gotongrojong, untuk menumbuhkan diktatur perseorangan dan kapitalisme birokrasi, untuk meng-uber² kaum progresif dan melarang kegiatan PKI dan organisasi² massa revolusioner dan seribu-satu matjam lagi pengekangan² dan pembatasan². „Experimen Tiga Selatan", jaitu Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan merupakan tjontoh jang sangat menjolok tentang tidak dilaksanakannja Amanat Presiden tanggal 16 Desember 1959 tersebut. Ini tentu sadja tidak ada miripnja dengan maksud dinjatakannja keadaan bahaja. Memindjam perkataan Bung Karno: ini se-mata² karena bedil mau memimpin Manipol dan bukan Manipol jang memimpin bedil.

Kongres djuga dengan teliti telah mengikuti praktek² pelaksanaan program Pemerintah mengenai sandang-pangan Rakjat dan pelaksanaan Pola Pembangunan 8 Tahun dan dalam hubungan ini mentjatat matjam² tindakan main-komando dan main-paksa jang mematikan

antusiasme Rakjat pekerdja, terutama kaum buruh dan kaum tani, padahal antusiasme itu merupakan sjarat mutlak untuk berhasilnja usaha peningkatan produksi dan pembangunan nasional pada umumnja. Kongres menjimpulkan bahwa jang mendjadi biang keladi dari berbagai kematjetan, kemerosotan dan kegagalan dibidang produksi dan distribusi jang menambah parahnja krisis ekonomi dan moneter jalah tumbuhnja dan bertjokolnja kaum kapitalis birokrat. Mereka ini sekarang terutama menggunakan keadaan bahaja sebagai perisai, disamping menggunakan birokrasi, untuk memperkuat posisinja sebagai kapitalis.

Semua kenjataan ini membenarkan tjanang Kongres Nasional ke-VI PKI jang memperingatkan bahwa: *„Kekuasaan militer telah memperlihatkan segi² positifnja, terutama di-daerah² bergolak. Akan tetapi tidak sedikit segi² negatifnja, jang djika tidak segera diachiri bisa berlarut² dan bisa menutupi segi² positif daripada kekuasaan militer itu".*

Oleh karena itu, sesuai dengan harapan Rakjat, Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) PKI dengan suara bulat menuntut realisasi daripada Resopim, dimana Presiden Sukarno a.l. mengatakan sbb.: *„Tetapi bagaimanapun, dengan diperolehnja hasil² baik dalam menjelesaikan keamanan dibeberapa daerah, maka keadaan perang jang pada tanggal 14 Maret 1957 dinjatakan untuk seluruh wilajah Republik Indonesia sewaktu menghadapi pemberontakan, tidak perlu lagi dipertahankan seluruhnja".*

Djadi, Kongres berpendapat bahwa tjukuplah keadaan bahaja itu berlaku di-daerah² jang berbatasan dengan Irian Barat dan di-daerah² dimana masih terdapat sisa² gerombolan kontra-revolusioner dalam djumlah besar, tetapi bagi daerah² lainnja supaja dihapuskan samasekali. Hanja dalam keadaan ada demokrasi, gagasan Demokrasi Terpimpin mungkin berdjalan setjara normal untuk memperkuat persatuan dan mobilisasi nasional, jang me-

rupakan sjarat mutlak untuk berhasilnja Triprogram Pemerintah dan Trikomando Rakjat.

Kongres berseru kepada segenap kader dan anggota Partai untuk lebih memperkuat persatuan nasional dan dengan lebih berani, lebih pandai, lebih waspada, lebih gigih dan lebih tekun melandjutkan ofensif Manipol dengan mengibarkan tinggi² Tripandji Partai dan Tripandji Bangsa menudju terbentuknja Kabinet Gotongrojong dan pentjabutan keadaan bahaja, serta penindjauan kembali UUKB jang berlaku sekarang.

Madju terus untuk demokrasi, persatuan dan mobilisasi guna pengubahan demokratis dilapangan sistim politik dan dilapangan kebebasan politik bagi Rakjat !

Kongres Nasional Ke-VII
(Luarbiasa) PKI

Djakarta, 29 April 1962

LAKSANAKAN PEMILIHAN UMUM JANG DEMOKRATIS DALAM TAHUN INI DJUGA !

Dalam rangka usaha menggalang persatuan total jang berporoskan Nasakom dan dalam rangka pelaksanaan garis² Manipol, pemilihan umum untuk semua lembaga kekuasaan negara sesuai dengan Undang² Dasar 45 merupakan masalah jang sangat penting.

Didalam Manipol ditegaskan bahwa Undang² Pemilihan Umum akan diperbaharui dalam rangka retuling disemua bidang. Tentang Undang² Pemilihan Umum jang bagaimana jang harus dibuat, didalam Lampiran A dari Ketetapan MPRS No. II paragrap 395 angka 21 ditegaskan sbb.:

1. Pemilihan umum untuk anggota DPRD supaja bersamaan dengan pemilihan untuk DPR dan MPR;
2. Harus segera dibuat Undang² Pemilihan Umum jang baru untuk maksud tersebut ajat (1) jang mengandung prinsip² umum, langsung, bebas dan rahasia.

Djadi, baik Manipol maupun Ketetapan MPRS menghendaki segera adanja Undang² Pemilihan Umum jang baru untuk anggota DPR, MPR dan DPRD jang mendjamin prinsip² pemilihan setjara umum, langsung, bebas dan rahasia.

Meskipun Pemerintah sudah mendjandjikan akan melaksanakan pemilihan umum pada achir tahun 1962, tetapi sampai sekarang belum djuga tampak persiapan² untuk pemilihan umum itu. Jang telah dibikin oleh Pemerintah malahan baru satu Rentjana Undang² jang samasekali tidak sesuai dengan djiwa dan semangat Manipol serta bertentangan dengan Ketetapan MPRS, karena Rentjana Undang² ini menghendaki hanja sepertiga dari anggota DPR jang dipilih, sedangkan jang lainnja diangkat. Oleh karena itu tidak mengherankan, bahwa Rentjana Undang² ini, segera setelah diadjukan oleh Pemerintah ke DPR GR, ditolak oleh bagian terbesar Rakjat Indonesia, sehingga Presiden mengambil kebidjaksanaan untuk menariknja kembali dari DPR GR.

Belum adanja persiapan jang sungguh² untuk menjatakan pemilihan umum, djuga dapat dilihat pada kenjataan bahwa dalam Rantjangan Anggaran Belandja Negara tahun 1962 jang kini sedang dibahas oleh DPR GR tidak disediakan anggaran untuk pemilihan umum.

Berdasarkan kenjataan² diatas, Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) PKI memutuskan untuk mendesak kepada Pemerintah:

1. Supaja segera mengadjukan Rantjangan Undang² Pemilihan Umum jang demokratis untuk anggota² DPR, MPR dan DPRD tingkat I, II dan III jang dapat diterima oleh semua golongan Rakjat, jang mendjamin prinsip² pemilihan setjara umum, langsung, bebas dan rahasia, serta jang memberi hak kepada Presiden untuk memeriksa dan dimana perlu mengoreksi daftar tjalon².
2. Supaja segera mengadakan persiapan² sebagaimana mestinja, sehingga pemilihan umum dapat dilaksanakan pada achir tahun ini sesuai dengan djandji Pe-

merintah, atau se-tidak²nja pada bagian pertama tahun 1963.

Kongres Nasional Ke-VII
(Luarbiasa) PKI

Djakarta, 29 April 1962

DEMOKRASIKAN PEMERINTAH DAERAH !

Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) PKI jang dilangsungkan pada tanggal 25 s/d 30 April 1962 di Djakarta, sepenuhnja membenarkan konstatasi dalam Laporan Umum Kawan Aidit, bahwa meskipun Penpres No. 6/1959 dan Penpres No. 5/1960 telah disempurnakan, tetapi masih dilaksanakan dengan tidak atau belum mengoreksi segala sebab² gugatan Rakjat jang menjebabkan kedua Penpres tersebut disempurnakan dengan tjampurtangan Presiden. Ini berarti bahwa gagasan Demokrasi Terpimpin belum berdjalan sebagaimana mestinja di Daerah².

Keadaan sebagaimana dinjatakan diatas ini adalah tidak sesuai dengan apa jang ditegaskan oleh Presiden Sukarno dalam Resopim, jaitu bahwa *„tulang-punggung, darah-daging sosialisme Indonesia jalah pelaksanaan di-daerah"*. Djuga tidak sesuai dengan Ketetapan MPRS No. II, jang pada pasal 4 ajat (1) menegaskan bahwa *„Untuk mendjamin berhasilnja pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Delapan Tahun 1961-1969, diperlukan penjesuaian seluruh aparatur negara dengan tugasnja dalam rangka pelaksanaan Manifesto Politik dan Amanat Pembangunan Presiden tentang Pembangunan Semesta Berentjana serta Ketetapan² Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara"*.

Djadi, untuk mewudjudkan aparatur negara di-daerah², jaitu Pemerintahan Daerah, jang memenuhi sjarat² dan sifat² stabil dan berkewibawaan, mentjerminkan kehendak Rakjat, revolusioner dan gotongrojong, maka perlu diadakan retuling dari atas sampai kebawah. Hanja

Pemerintahan Daerah jang demikian itulah jang dapat memobilisasi seluruh kekuatan membangun jang memungkinkan Daerah mendjadi tempat berkembangnja demokrasi terpimpin, mendjadi tulang-punggung dan darah-daging pelaksanaan demokrasi terpimpin.

Berdasarkan keterangan^2 diatas, Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) PKI memutuskan untuk mendesak kepada Pemerintah:

1. Supaja Penpres No. 6/1959 (disempurnakan) dan Penpres No. 5/1960 (disempurnakan), selagi masih berlaku, jaitu sebelum diadakan pemilihan umum untuk anggota^2 DPRD tingkat I, II dan III, dilaksanakan dengan tepat, sehingga gagasan Demokrasi Terpimpin dengan poros Nasakom benar^2 terlaksana sebagaimana mestinja setjara merata disemua daerah.
2. Supaja Pemerintah tidak ragu^2 melaksanakan dengan konsekwen Undang^2 No. 6/1959 tentang penjerahan tugas^2 dan wewenang Pemerintahan Umum kepada Daerah^2.

Selandjutnja, Kongres djuga menuntut:

1. Supaja pemerintah segera melaksanakan Ketetapan MPRS jang menghendaki supaja hanja ada satu sadja Undang^2 Pokok tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Per-undang^{2}an tentang Pemerintah Daerah jang bersimpang-siur, jaitu adanja UU No. 1/1957, disamping Penpres No. 6/1959 (disempurnakan) dan Penpres No. 5/1960 (disempurnakan).
2. Supaja Pemerintah segera melaksanakan Ketetapan MPRS mengenai retuling desa dengan mengganti segala peraturan-perundangan desa kolonial seperti IGO, IGOB dan lain^2 dengan Undang^2 Nasional jang mendjamin kemadjuan^2 desa dan pendemokrasian tatapedesaan, chusus dengan djalan membentuk Daswati Tingkat III.

Kongres Nasional Ke-VII
(Luarbiasa) PKI

Djakarta, 29 April 1962

MOBILISASI KEKUATAN SE-BESAR²NJA GUNA MENGATASI KRISIS PANGAN !

Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) PKI jang dilangsungkan pada tanggal 25 s/d 30 April 1962 di Djakarta dengan rasa prihatin mengikuti perkembangan ekonomi dan keuangan negeri jang makin memburuk, jang ditandai oleh meningkatnja harga kebutuhan pokok sehari² sampai 248% djika dibandingkan dengan tahun 1959, terutama oleh meningkatnja harga kebutuhan terpokok, jaitu beras.

Disebagian besar desa ditanahair kita, Rakjat telah menderita kekurangan makan dan mengalami musim patjeklik jang lebih berat dan lebih pandjang dari tahun² sebelumnja. Disana-sini bahkan sudah terdapat penjakit busung lapar.

Keadaan ini dapat dipergunakan oleh musuh² Republik untuk menjebarkan sinisme, apatisme dan defaitisme dikalangan Rakjat untuk melemahkan tekad dan semangat Rakjat dalam perdjuangan pembebasan Irian Barat dan melemahkan kegairahan Rakjat dalam ikutserta melaksanakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama Ketetapan MPRS.

Oleh karena itu, Kongres berpendapat bahwa krisis pangan dewasa ini harus segera diatasi.

Kongres berpendapat bahwa krisis pangan ini terutama bersumber pada kemerosotan produksi pangan jang terdjadi pada tahun 1961 jang lalu. Seperti dinjatakan oleh Pemerintah, produksi padi pada tahun 1961 hanja mentjapai 15,8 djuta ton, jang berarti kemerosotan 1 djuta ton dari produksi tahun 1960 jang berdjumlah 16,86 djuta ton; produksi bahan makanan lain seperti djagung dan ketela, pada tahun 1961 djuga merosot. Sedang rentjana produksi padi tahun 1962 sebesar 20,4 djuta ton masih diragukan untuk dapat ditjapai.

Sebab lain jang menjebabkan kenaikan harga bahan

makanan jalah politik harga Pemerintah, seperti politik jang menaikkan harga alat² pertanian, tekstil kasar, bensin, minjak tanah, tarif pengangkutan dsb. dan djuga pemungutan² luarbiasa dibanjak daerah diluar ketentuan UU dan Peraturan Pemerintah, jang sangat memberatkan kaum tani.

Disamping itu, djuga disebabkan oleh tjara² distribusi jang belum beres dan oleh perbuatan² djahat kaum kapitalis birokrat dan kaum parasiter lainnja jang dengan menggunakan birokrasi melakukan korupsi, manipulasi, pentjolengan dan perbuatan² lain jang langsung atau tidak langsung menghambat kelantjaran produksi, mengurangi persediaan dan mempersulit distribusi bahan makanan dan bahan kebutuhan pokok lainnja daripada Rakjat.

Kongres berpendapat bahwa untuk mengatasi krisis pangan, segala djalan harus ditempuh guna meningkatkan produksi pangan terutama beras, dan mengatur setjara baik distribusinja. Seperti dinjatakan dalam Laporan Umum Kawan Aidit kepada Kongres, kuntji untuk mempertinggi produksi beras adalah membangkitkan kegairahan dan dajatjipta kaum tani sebagai tenaga produktif.

Untuk membangkitkan kegairahan bekerdja dan dajatjipta kaum tani, Kongres mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah² sbb.:

1. Menggantikan badan² jang tidak efektif dalam bidang produksi dengan membentuk Dewan² Perusahaan dan Dewan² Produksi Pertanian dari Pusat sampai ke-daerah² dengan mengikutsertakan wakil² organisasi² buruh dan tani jang representatif. Dalam dewan² ini supaja dimusjawarahkan soal perentjanaan dan pelaksanaan plan produksi, seperti masalah penetapan areal, penetapan djatah produksi, masalah pembeajaan dan soal² lainnja jang bersangkutan dengan usaha mempertinggi produksi pangan.
2. Memberikan kebebasan berapat, berkumpul dan menjatakan pendapat setjara lesan dan tulisan bagi Rak-

jat terutama kaum buruh dan kaum tani, untuk merundingkan masalah² peningkatan produksi dan mentjegah terdjadinja tindakan² kekerasan dan paksaan terhadap Rakjat, terutama dalam menjelesaikan sengketa² tanah.

3. Melaksanakan dengan sungguh² ketentuan² UU Perdjandjian Bagi Hasil dan UU Pokok Agraria, menetapkan antjaman hukuman (sanksi) kepada pedjabat² sivil dan militer jang langsung atau tidak langsung merintanginja.
4. Memperbesar dan mempermudah pemberian kredit kepada kaum tani dengan bunga jang ringan.
5. Melarang dilandjutkannja pungutan² dan mentjabut peraturan² penguasa setempat jang memberatkan dan membawa akibat kemerosotan daja-produksi dari kaum produsen.

Selandjutnja Kongres menjerukan kepada segenap anggota Partai dan anggota Pemuda Rakjat, terutama dari kalangan kaum tani, untuk terus berdjuang dengan tekad *„satu tangan pegang bedil dan satu tangan lagi pegang patjul"*, dan terus melaksanakan Gerakan 1001 guna meningkatkan produksi bahan makanan.

Mengenai bidang distribusi bahan² kebutuhan pokok Rakjat, Kongres mendesak Pemerintah agar:

1. Memberikan indjeksi beras pada daerah² jang kekurangan dan ke-desa² untuk kaum tani pada musim menggarap tanah dan mengharuskan mengikuti harga rendah bagi barang² kebutuhan pokok se-hari² jang ditetapkan Pemerintah serta mentjegah dan membatalkan tindakan Pemerintah untuk menaikkan harga.
2. Menghapuskan saluran² distribusi jang tidak perlu dan menggantikannja dengan RK/RT, koperasi dan pedagang² etjeran setelah mendengar RK/RT jang bersangkutan sebagai distributor² bahan makanan untuk Rakjat.
3. Mengumumkan kepada Rakjat mengenai tempat dan djumlah semua alokasi bahan² kebutuhan pokok dan didjalankannja pengawasan oleh Pemerintah dan oleh

Rakjat dengan membangkitkan dan mengorganisasi kontrol Rakjat dalam bentuk Dewan² Pengawas Distribusi dari atas untuk Rakjat.

4. Mengambil tindakan kepada penimbun² bahan makanan, dengan mewadjibkan para penimbun melaporkan diri:
   a. penimbun jang melaporkan diri diberi ganti rugi dengan harga Pemerintah.
   b. Penimbun jang tidak melaporkan diri dan kemudian diketahui oleh Pemerintah, dibeslah barang²-nja tanpa ganti rugi dan penimbunnja dihukum.
5. Memobilisasi alat² pengangkutan instansi sivil dan militer untuk keperluan melantjarkan distribusi bahan² makanan dan menurunkan kembali tarif² pengangkutan.

Achirnja, Kongres menjerukan kepada kaum Komunis untuk selalu berdiri didepan membantu Rakjat dalam memetjahkan kesulitan² hidupnja dan membantu kaum tani mengatasi kesulitan² dalam usaha mereka meningkatkan produksi pangan.

Kongres Nasional Ke-VII
(Luarbiasa) PKI

Djakarta, 29 April 1962.

LAKSANAKAN PEMBELIAN PADI SESUAI DENGAN DJIWA DAN SEMANGAT INSTRUKSI PRESIDEN SUKARNO !

Untuk distribusi pegawai negeri sivil dan militer, kaum buruh dan penduduk kota, untuk membantu daerah² jang tidak atau kurang menghasilkan beras dan daerah² jang diserang bentjana alam dan kelaparan, Pemerintah memerlukan tjukup persediaan beras.

Persediaan itu terutama didapat dari hasil pembelian padi dan gabah dalamnegeri.

Berdasarkan kepentingan tersebut diatas, Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) PKI, menjatakan persetudju-

annja terhadap usaha² Pemerintah untuk menguasai sebagian produksi beras dalamnegeri, dengan djalan melakukan pembelian padi.

Sampai sekarang, Pemerintah belum pernah berhasil mentjapai djatah pembelian padi jang diperlukan, meskipun djatah itu hanja meliputi 10% dari djumlah produksi nasional. Sebabnja terletak terutama pada kurangnja produksi padi, tetapi djuga pada tjara dan sasaran² pembelian. Pada tahun² jang lalu djatah pembelian ditetapkan se-mata² atas dasar luas garapan dan milik tanah petani dengan harga lebih rendah dari biaja produksi dan djauh lebih rendah dari harga pasaran bebas, sehingga berakibat memberatkan kaum tanimiskin dan tani sedang, sebaliknja meringankan beban tuantanah, tanikaja serta pemilik² dan penimbun² padi besar lainnja.

Petugas² pembelian padi, didorong oleh nafsu mentjapai keuntungan se-besar²nja untuk diri-sendiri, tidak djarang mendjalankan praktek² beli paksa dengan mengadakan blokade² daerah dan dengan melakukan penipuan² dalam menilai kwalitet padi dan menimbang berat padi serta praktek² tertjela lainnja lagi. Petugas² pembeli padi Pemerintah banjak mengedjar-ngedjar tanimiskin, tanisedang, bahkan buruhtani, untuk mendjual sebagian hasil padinja, tetapi sebaliknja membiarkan tanikaja dan tuantanah menimbun padi berlebihan, jang pada musim² patjeklik digunakan untuk mentjekik batang leher kaum tani dengan djalan memberikan pindjaman dengan bunga sangat tinggi.

Dengan tjara² demikian, pembelian padi jang direntjanakan oleh Pemerintah tidak pernah berhasil, meskipun dengan pengorbanan jang besar dari tanisedang, tanimiskin dan buruhtani.

Berdasarkan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi No. 11 tahun 1961, dalam tahun 1962 Pemerintah bermaksud mendjalankan pembelian padi hasil dalamnegeri sebesar 3,5 djuta ton, jang diperkirakan merupakan 15% dari produksi nasional jl. jang besarnja ditaksir 20,5 djuta ton. Dibandingkan dengan target pembelian padi

pada tahun2 jl. rentjana pembelian padi tahun 1962 ini meletakkan tugas jang lebih berat bagi Pemerintah dan bagi kaum tani sendiri.

Tugas ini akan dapat terpenuhi djika rentjana peningkatan produksi padi dan bahan makanan lain2nja dapat berhasil. Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) PKI menjatakan sokongan sepenuhnja terhadap usaha2 Pemerintah untuk meningkatkan produksi padi dan bahan makanan lainnja serta produksi pertanian dan perindustrian pada umumnja.

Kongres djuga dapat membenarkan usaha2 pembelian padi Pemerintah untuk tahun 1962, apabila pembelian padi itu benar2 dilaksanakan sesuai dengan isi dan djiwa Instruksi Presiden No. 11 tahun 1961 dan Amanat Presiden tanggal 22 April 1962 jbl., sehingga dapat memenuhi kebutuhan tanpa terlalu banjak merugikan kaum tani.

Ini berarti bahwa penetapan djatah bagi masing2 petani dan penetapan harga padi seperti dinjatakan oleh Presiden harus *„dilakukan setjara progresif atas dasar musjawarah Desa, tidak boleh sembrono, harus dengan tertib, teratur dan adil"*.

Selain daripada itu dalam Ketentuan Kedua Instruksi Presiden (pendjelasan) djuga dengan tegas dikatakan bahwa *„dalam usaha mengumpulkan djatah padi jang ditetapkan baginja, desa sebagai unit kolektif menetapkan djatah2 untuk masing2 pemilik padi"* dan bahwa penetapan djatah2 tersebut harus *„dilakukan dengan mengingat luas sawah, hasil padinja serta kebutuhan sipemilik padi akan padi konsumsi"*.

Dengan demikian, djatah bagi masing2 petani ditetapkan melalui suatu Musjawarah Desa dengan teliti, tidak boleh sembrono, tertib dan adil, sehingga dapat ditetapkan suatu djatah jang progresif, artinja djatah jang tidak terlalu memberatkan tanimiskin dan tanisedang, membebaskan buruhtani dan memikulkan sebagian terbesar beban djatah pembelian padi kepada tuantanah, tanikaja dan tengkulak2 dan penimbun2 padi.

Mengenai harga pembelian padi, seperti dinjatakan dalam Ketetapan Ketiga Instruksi Presiden, seharusnja ditetapkan *„keseimbangan dengan harga barang² keperluan pokok Rakjat tani, sehingga terpelihara gairah kerdja untuk mempertinggi produksi padi"*. Untuk meringankan beban keuangan pemerintah dan mengurangi beban berat kaum tani jang ditimbulkan dari perbedaan harga pembelian Pemerintah dengan harga padi dipasaran bebas, Pemerintah supaja mengusahakan persediaan barang² keperluan pokok petani dengan harga Pemerintah seperti dinjatakan dalam pendjelasan Ketentuan Ketiga Instruksi Presiden, jaitu pupuk, bibit unggul, gula, garam, ikan asin, minjak tanah, tekstil dsb.nja.

Untuk memungkinkan Pemerintah memenuhi djatah pembelian padi, Kongres mendesak pada Pemerintah supaja dengan segera dan setjara sungguh² melaksanakan perubahan-tanah (landreform) sesuai dengan ketentuan² Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 dan memasukkan kedalam djatah pembelian setoran kaum tani jang mendapat bagian tanah kepada Pemerintah, jaitu sepertiga dari hasil panenan jang berupa padi seperti ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Kongres mengusulkan kepada Pemerintah untuk mengadakan rituling terhadap badan² dan petugas² pembelian padi, sehingga badan² dan petugas² pembelian padi terdiri dari orang² jang patriotik, tjakap, demokratis dan ber-tjita² Sosialisme, jang benar² memahami dan setia melaksanakan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi No. 11 tahun 1961 sesuai dengan isi dan djiwanja.

Mengenai izin pengedaran dan penjimpanan padi, gabah dan beras, Kongres menjokong Amanat Presiden tanggal 22 April 1962 untuk menghapuskan blokade². Berlakunja blokade² selama ini telah membikin peredaran perdagangan padi, gabah dan beras tidak normal, telah mematikan pedagang² etjeran dan mendorong penggelapan², manipulasi², suap dan korupsi. Kongres mengusulkan agar Pemerintah menetapkan peraturan peredaran dan penjimpanan padi, gabah dan beras jang men-

djamin kehidupan perdagangan beras etjeran, mendjamin hak kaum tani untuk mempunjai persediaan padi untuk penghidupan keluarga dan biaja mengerdjakan tanahnja, mendjamin hak koperasi² tani dan lumbung² desa untuk menjimpan dan mengedarkan padi, gabah dan beras milik koperasi² tani dan lumbung² desa, sebaliknja melarang penimbunan padi, gabah dan beras besar²an jang biasanja digunakan untuk menghisap kaum tani pada musim² patjeklik dan mengatjaukan peredaran dan harga beras dipasaran bebas.

Kongres berpendapat bahwa Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi No. 11 tahun 1961 dapat dilaksanakan sesuai dengan isi dan djiwanja dalam arti dapat digunakan untuk mengembangkan semangat Gotongrojong dalam pengumpulan padi tanpa terlalu memberatkan kaum tani, apabila ada pengawasan jang kuat dengan mengikutsertakan massa Rakjat. Untuk itu, Kongres mendesak kepada Pemerintah supaja segera membentuk Dewan² Pertimbangan dan Pengawasan Pembelian Padi dan Distribusi Beras, seperti diamanatkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 22 April 1962.

Kongres berkejakinan, bahwa dengan memenuhi usul² tersebut diatas, akan terdapat sjarat² lebih baik bagi Pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan akan persediaan padi dengan tidak terlalu merugikan dan memberatkan beban jang diderita oleh kaum tani.

Kongres Nasional Ke-VII
(Luarbiasa) PKI

Djakarta, 29 April 1962

SUKSESKAN PELAKSANAAN PLAN 8 TAHUN!

Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) PKI jang dilangsungkan pada tanggal 25 s/d 30 April 1962 di Djakarta, memberikan perhatian setjara chusus terhadap masalah pelaksanaan Plan 8 Tahun 1961-1969, Ketetapan II MPRS.

Plan 8 Tahun adalah program bersama Rakjat Indonesia dibidang kehidupan materiil dan kulturil, suatu program pembangunan jang mempersiapkan dasar untuk membangun ekonomi nasional jang berdiri sendiri, tidak tergantung dan jang bebas dari sisa² ekonomi kolonial dan ekonomi feodal.

Kongres mengkonstatasi bahwa pelaksanaan Plan 8 Tahun jang sampai sekarang sudah berdjalan setahun lebih, belum terlaksana dengan lantjar dan bahkan mengalami kematjetan². Ini disebabkan karena kemerosotan keadaan ekonomi dan keuangan negara, kekurangan² dalam sistim pengorganisasian plan dan karena adanja rintangan² serta penjelewengan² dalam pelaksanaan. Belum diikutsertakannja Rakjat pekerdja setjara demokratis djuga telah sangat mempengaruhi kelantjaran pelaksanaan plan.

Kongres berpendapat bahwa Plan 8 Tahun harus disukseskan dan untuk itu adalah kewadjiban semua kekuatan progresif untuk menggagalkan usaha² kaum reaksi jang bermaksud mensabot pelaksanaannja. Kaum reaksi memang berkepentingan untuk menggagalkan Plan 8 Tahun, *pertama,* karena Plan 8 Tahun adalah program bersama persatuan nasional jang berporoskan Nasakom berlandasan Manipol dan Amanat Pembangunan Presiden jang bersifat anti-imperialis dan anti-feodal, dan *kedua,* karena suksesnja Plan 8 Tahun akan berarti tertjapainja swasembada sandangpangan dan dimulainja industrialisasi negeri. Ini berarti berkurangnja ketergantungan ekonomi Indonesia pada negara² imperialis, berarti diperlemahnja imperialisme, sandaran hidup kaum reaksioner.

Agar supaja krisis ekonomi dan keuangan sekarang dapat diatasi dan kegagalan Plan 8 Tahun dapat ditjegah, maka adalah sangat penting diambilnja segera tindakan² tegas untuk mengoreksi semua sebab kematjetan sekarang, antara lain tindakan² sbb.:

1. Demokrasikan pelaksanaan Plan 8 Tahun dengan mengerahkan segenap potensi pembangunan Rakjat Indonesia; perhebat pendjelasan² mengenai Plan 8

Tahun; atasi kesulitan² ekonomi se-hari² daripada Rakjat; tjabut kedaan bahaja di-daerah² dimana tidak ada operasi militer, sehingga terdapat suasana bebas dan tanpa paksaan dalam pelaksanaan Plan 8 Tahun; bentuk segera Dewan² Perusahaan, Dewan² Produksi Pertanian dan Dewan² Pengawas Distribusi sampai ke-basis².

2. Adakan pengubahan orientasi dalam menstabilisasi keadaan ekonomi dan keuangan negara; djadikan produksi sandaran untuk menstabilisasi nilai rupiah dan menstabilisasi harga; laksanakan penggarapan pada unit² produksi jang berada dibawah kekuasaan negara se-intensif²nja dengan menetapkan djatah² kenaikan produksi jang realistis: tiap investasi pada perusahaan negara harus disertai dengan rentjana jang kongkrit mengenai kenaikan prestasi dan produksi, sehingga dengan demikian perusahaan² negara mendjadi sumber pemasukan keuangan negara dan pembiajaan pembangunan.
3. Dalam rangka perdjuangan pembebasan Irian Barat, sita modal Belanda jang sudah diambilalih dan jang berada dalam perusahaan² tjampuran untuk memperkuat sumber pembiajaan Plan 8 Tahun.
4. Kuasai hasil devisen modal² monopoli asing dilapangan perminjakan (Shell, Stanvac dan Caltex), ketjuali jang dilokalisasi Pemerintah untuk transfer keuntungan, djasa² dsbnja, sehingga dapat menutup ketekoran devisen negara untuk import barang² jang diperlukan untuk memulihkan keadaan ekonomi dan pelaksanaan Plan 8 Tahun.
5. Keluarkan peraturan jang memberikan kesempatan kepada swasta nasional untuk merealisasi bidang² pembangunan atau projek² tertentu jang tidak vital; alokasi barang² baku jang diimport PDN², selain didistribusikan kepada perusahaan² negara jang membutuhkan, djuga supaja didistribusikan langsung kepada perusahaan² swasta nasional jang produktif setjara adil.

6. Segera atasi rintangan^2 dan pertjepat realisasi kredit^2 luarnegeri, terutama kredit^2 dari negeri sosialis, dan gunakan kredit^2 itu setjara efektif untuk pelaksanaan Plan 8 Tahun.
7. Laksanakan koordinasi jang efektif, sistim pengawasan dari atas dan dari bawah, sistim pelaporan dan penilaian setjara periodik, serta djika perlu adakan revisi^2 dalam pelaksanaan Plan 8 Tahun sesuai dengan kemadjuan^2 dan kekurangan^2 dalam pelaksanaannja.
8. Laksanakan rituling setjara radikal dalam bidang politik dan ekonomi untuk menjingkirkan pedjabat^2 jang bertanggungdjawab dalam pelaksanaan Plan 8 Tahun jang korup dan tidak tjakap didalam aparatur negara dan perusahaan^2 dan ganti mereka dengan tenaga^2 jang patriotik, ahli dan ber-tjita^2 Sosialisme.

Kongres berpendapat bahwa hanja dengan mentjiptakan sjarat^2 sebagai disebutkan diatas, jaitu sjarat ekonomi dan keuangan, sjarat^2 tjara pengorganisasian dan sjarat^2 politik sesuai dengan Manipol dan Amanat Pembangunan Presiden serta Ketetapan^2 MPRS, Plan 8 Tahun bisa dilaksanakan dengan sukses.

Oleh karena itu, Kongres dengan suara bulat mendesak Pemerintah agar Pemerintah mentjurahkan perhatian jang sungguh^2 terhadap masalah ini.

Kepada kaum progresif dan kaum Manipolis sedjati, Kongres berseru supaja dengan sungguh^2 turut berusaha mentjiptakan sjarat^2 tersebut agar Plan 8 Tahun dapat dilaksanakan dengan sukses.

Kongres Nasional Ke-VII
(Luarbiasa) PKI

Djakarta, 29 April 1962

LAWAN NEO-KOLONIALISME !

Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) Partai Komunis Indonesia jang dilangsungkan pada tanggal 25 s/d 30

April 1962 di Djakarta, sepenuhnja sependapat dengan Laporan Umum Kawan D.N. Aidit jang antara lain menjatakan bahwa perlu ditjurahkan perhatian istimewa oleh Pemerintah dan Rakjat Indonesia terhadap berbagai bentuk neo-kolonialisme jang harus dilawan.

Kongres menggarisbawahi penegasan jang diberikan oleh Konferensi Masalah Neo-Kolonialisme di Leipzig dalam tahun 1961 bahwa neo-kolonialisme adalah „bentuk tipikal dan jang utama dari politik kolonial imperialis dalam sjarat² sedjarah pada zaman peralihan dari kapitalisme ke Sosialisme, chususnja pada periode keruntuhan dan kehantjuran terang²an daripada sistim kolonial jang langsung".

Kedjadian² jang sedang berlangsung di Asia, Afrika dan Amerika Latin membuktikan dengan djelas bahwa neo-kolonialisme, sebagaimana ditegaskan oleh Sidang Dewan Setiakawan Rakjat² Asia-Afrika di Bandung dalam bulan April 1961, adalah „suatu bentuk baru dari imperialisme, terutama imperialisme Amerika Serikat, bentuk kekuasaan jang tidak langsung serta halus melalui bidang politik, ekonomi, sosial, militer dan teknik".

Kongres menundjukkan bahaja besar jang dihadapi oleh segenap umatmanusia jang demokratis, tjinta kemerdekaan dan tjinta damai jalah berlangsungnja perang jang tidak diumumkan antara AS dengan Rakjat patriotik Vietnam Selatan jang berdjuang mati²an untuk demokrasi, perdamaian nasional, politik netral dan penjatuan kembali negerinja.

Selama 7 tahun jang silam AS telah berusaha untuk mendjadikan Vietnam Selatan sebagai pangkalan militernja dan djadjahan model baru.

AS telah membandjiri Vietnam Selatan dengan pasukan² dan alat² sendjata. Belum pernah djumlah sendjata jang dimasukkan ke Vietnam Selatan begitu besarnja seperti sekarang. Diantara sendjata² itu termasuk jang termodern, sendjata² roket micro jet dan gas explosif sebagaimana ditulis oleh "Newsweek". Komando operasi AS jang ditugaskan untuk memimpin kegiatan pasukan²

AS dan angkatan bersendjata boneka Ngo Din Diem, merupakan detasemen pelopor dari Komando pasukan² AS di Pasifik. Rezim boneka AS, Ngo Din Diem, tanpa hentinja mendjalankan politik penindasan jang ganas, telah menutup segala kemungkinan bagi Rakjat untuk bekerdja dan hidup dengan damai. Vietnam Selatan telah dirubahnja mendjadi negeri kamp-konsentrasi, negeri 1000 pendjara dan negeri siksaan.

Adalah hak jang sah dari Rakjat Vietnam Selatan untuk bangkit melawan. Ini sesuai dengan Piagam Umum Hak² Azasi Manusia serta dengan prinsip² jang tertera dalam Resolusi Sidang ke-15 Madjelis Umum PBB mengenai keharusan untuk mengachiri kolonialisme dalam segala bentuknja.

Situasi di Vietnam Selatan telah mendjadi sangat serius berhubung dengan terkonsentrasinja kekuatan² militer AS dan makin intensifnja agresi militer AS. Ini berarti bahwa AS telah membikin situasi di Asia Tenggara-Pasifik mendjadi gawat.

Djuga di Laos pengabdi² neo-kolonialisme AS, klik Boun Oum Nasavan dengan dikendalikan oleh kaum imperialis terus-menerus menimbulkan kekatjauan² dan mensabot pelaksanaan prinsip² perdamaian jang telah ditetapkan dalam Persetudjuan² Zurich dan Hin Hop.

Djalan keluar untuk memetjahkan masalah Vietnam Selatan dan Laos, tidaklah lain daripada mewudjudkan dalam kenjataan Persetudjuan Djenewa tahun 1954 mengenai masalah Indotjina, jang telah di-robek² dan di-indjak² oleh AS.

Kongres mendukung sepenuhnja Statement Politbiro serta Resolusi Sidang Pleno ke-3 CC PKI jang mengutuk usaha neo-kolonial kaum imperialis Inggris untuk membentuk federasi Malaysia dengan menggunakan tangan pribumi. Federasi Malaysia tidak sadja berbahaja bagi Rakjat Malaja, Singapura, Serawak, Sabah dan Brunai, tetapi djuga bagi seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia, karena federasi ini terang dimaksudkan

untuk membela kedudukan kekuatan² lama jang bertjokol ("the old established forces") di Asia Tenggara.

Tjontoh neo-kolonialisme AS jang paling kurangadjar berlangsung di Konggo, negeri pahlawan besar Patrice Lumumba. Neo-Kolonialisme di Konggo sangat djahat karena menjelubungi permainan kotornja dengan kata² manis serta menutup-nutupi kedjahatannja dengan menondjolkan „pahlawan² separatis" pribumi.

Dengan menggunakan nama PBB, dengan menjuap pengchianat² Konggo seperti Tsombe, Mobutu, Kasavubu, Adoula, Ileo dan lain²nja lagi, jang telah bersedia untuk mengabdi kepentingan² kaum kapitalis monopoli, imperialisme AS menempatkan Konggo dibawah duli kekuasaannja dengan mendesak kedudukan² imperialis Inggris dan Belgia dan dengan menindas gerakan Rakjat Konggo jang patriotik dan jang dipelopori Wakil Perdana Menteri Antoine Gizenga.

Patrice Lumumba jang gugur mendjadi korban dari neo-kolonialisme ini merupakan simbul dari kebangkitan Afrika. Kongres menjatakan rasa-hormat jang se-tinggi²-nja kepada pahlawan Patrice Lumumba, kesajangan Rakjat Afrika dan jang ditjintai oleh segenap manusia progresif didunia.

„Persekutuan untuk Kemadjuan" jang ditelorkan oleh biang-imperialis AS untuk menempatkan Amerika Latin dibawah kepentingan neo-kolonialnja menghadapi perlawanan jang keras dari Rakjat. Imperialisme Yankee sangat dibentji oleh Rakjat Amerika Latin. Dengan revolusi Kuba jang gemilang sebagai mertjusuar dan digembirakan oleh kegagalan serdadu² sewaan AS jang menjerbu Kuba dipantai Giron, Rakjat Amerika Selatan melandjutkan dan memperhebat serangan² mereka terhadap imperialisme dan neo-kolonialisme AS.

Kongres Nasional ke-VII PKI menjatakan simpati dan solidaritetnja jang dalam dan sokongannja jang teguh tanpa reserve kepada segenap patriot² jang gagah berani dari Vietnam Selatan, Laos, Konggo, Malaja, Korea Selatan, Muangthai, Filipina, kepada segenap Rakjat Asia-

Afrika-Amerika Latin jang berdjuang dengan heroik melawan neo-kolonialisme untuk demokrasi, kemerdekaan sedjati dan perdamaian.

Chusus terhadap neo-kolonialisme di Asia Tenggara, berhubung dengan usaha pembentukan Federasi Malaysia dan situasi jang sangat gawat di Vietnam Selatan, Kongres menjerukan kewaspadaan jang berlipatganda kepada Pemerintah dan Rakjat Indonesia dan agar Pemerintah Indonesia tidak bersikap netral dan pasif.

Kongres Nasional Ke-VII
(Luarbiasa) PKI

Djakarta, 29 April 1962

BEBASKAN DAVID ALFARO SIQUEIROS !

Kongres Nasional ke-VII Partai Komunis Indonesia jang berlangsung di Djakarta pada tanggal 25 s/d 30 April 1962 mengutuk tindakan² se-wenang² terhadap kaum patriot Mexico oleh jang berkuasa.

David Alfaro Siqueiros, Sekretaris Djenderal Partai Komunis Mexico salah seorang diantara pelukis kenamaan, pedjuang gigih untuk demokrasi dan kemerdekaan Mexico telah mendjadi korban ketidakadilan dan kesewenangan ini. Pada tanggal 9 Agustus 1960 Siqueiros ditangkap tanpa surat perintah dan dengan kekerasan dengan dalih mendemoralisasi masjarakat, memiliki sendjata dengan tidak sah dan menghina serta melawan pembesar² Mexico.

Alasan sesungguhnja jalah aktivitet patriotik Siqueiros, antara lain dukungannja pada demonstrasi guru² dan mahasiswa² dikota Mexico. Penangkapan ini bertentangan dengan hukum dan merupakan perkosaan atas kebebasan² demokratis, seperti kebebasan berbitjara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berserikat jang didjamin oleh Undang² Dasar Mexico.

Bersama dengan David Alfaro Siqueiros ditangkap

djuga Felomena Mata, wartawan berpengalaman jang namanja terkenal dalam revolusi Mexico.

Kedua pahlawan ini jang masing2 telah berusia 65 dan 74 tahun telah dipendjarakan lebih dari 20 bulan dalam keadaan jang menjedihkan serta membahajakan kesehatannja.

Kongres Nasional ke-VII Partai Komunis Indonesia menjatakan setiakawannja jang dalam kepada patriot2 dan pahlawan Mexico ini, dan memperkuat tilgram Ketua CC PKI D.N. Aidit,, tertanggal 1 April 1962 jang memprotes pemerintah Mexico atas ketidakadilan dan kesewenangan ini.

Kongres Nasional ke-VII, ber-sama2 Rakjat seluruh dunia jang tjinta demokrasi dan kemerdekaan menuntut kepada Pemerintah Mexico supaja segera membebaskan David Alfaro Siqueiros dan patriot2 lainnja demi demokrasi dan keadilan.

Kongres Nasional Ke-VII
(Luarbiasa) PKI

Djakarta, 29 April 1962

BEBASKAN DAN REHABILITASI GIZENGA !

Antoine Gizenga, Wakil Perdana Menteri Konggo, pembela setia dari politik kemerdekaan nasional penuh dan demokratis jang dipelopori Patrice Lumumba, kini sedang berada dalam tahanan disertai siksaan2 jang mengantjam keselamatan djiwa raganja. Penangkapan Antoine Gizenga jang dilakukan oleh budak2 belian imperialis Mobutu dan Kasavubu dengan klik reaksionernja jang berkuasa di Leopoldville sekarang, adalah kelandjutan daripada komplotan pembunuhan terhadap Patrice Lumumba, sebagai pelaksanaan setjara sistimatis daripada rentjana imperialis Amerika Serikat untuk menghantjurkan kekuatan2 demokratis dan patriotik di Konggo.

Perbuatan Amerika Serikat untuk melaksanakan ren-

tjana²nja jang kedji dan terkutuk itu dilakukan dengan bernaung dibawah pandji² PBB. Untuk kedua kalinja setelah Perang Korea, Amerika Serikat telah menodai dan mensalahgunakan badan internasional ini guna kepentingannja sendiri jang serakah. Pemerintah Leopoldville sekarang telah mengabdi pada kepentingan imperialis dengan politiknja jang berkompromi dengan separatis Moise Tsombe, pembunuh Patrice Lumumba, dan dengan membiarkan Wakil Perdana Menteri Gizenga disiksa serta diratjun dalam pendjara.

Antoine Gizenga mewakili kepentingan² nasional Konggo, mewakili demokrasi dan kemerdekaan, mewakili kekuatan² jang sedang tumbuh di Konggo.

Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) PKI mendesak Sekdjen PBB U Thant dan Pemerintah Konggo agar Antoine Gizenga segera dibebaskan dan direhabilitasi kedudukannja sebagai Wakil Perdana Menteri Konggo.

Kongres berseru kepada Pemerintah RI untuk menempuh segala djalan jang mungkin guna pembebasan Gizenga.

Kongres Nasional Ke-VII
(Luarbiasa) PKI

Djakarta, 29 April 1962

DJANGAN SENTUH KUBA!

Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) PKI jang diadakan pada tanggal 25 s/d 30 April 1962 di Djakarta setelah membahas Laporan Umum Kawan D.N. Aidit tentang situasi internasional, memberi salut se-tinggi²nja kepada Rakjat Kuba jang gagah-perwira jang telah mendjadikan tanahairnja negeri bebas jang pertama dibenua Amerika.

Perdjuangan Rakjat Kuba bukan sadja tjontoh gemilang bagi Rakjat² Amerika Latin dalam melawan kaum penghisap dan penindas Amerika Serikat, tetapi djuga merupakan teladan bagi setiap Rakjat dimana sadja di-

bagian dunia ini jang berdjuang dan bertekad melenjapkan imperialisme untuk se-lama²nja.

Rakjat Kuba jang mendiami pulau ketjil diambang pintu benteng imperialisme dan pusat reaksi dunia, jaitu Amerika Serikat, membuktikan bahwa betapapun hebat dan ganasnja imperialisme, ia pasti mundur djika dilawan dan djika Rakjat bersatu-padu dibawah pimpinan jang tepat.

Setelah gagal menjerang dan menjerbu Kuba dipantai Giron pada bulan April setahun jang lalu, setelah menderita kekalahan jang memalukan di Konferensi Punta del Este dalam mengisolasi Rakjat Kuba, kaum imperialis Amerika Serikat dengan kepalabatu sekali lagi mempersiapkan intervensi militer terhadap Rakjat Kuba jang dewasa ini sedang membangun Sosialisme.

Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) PKI mempertegas sikap kaum Komunis Indonesia untuk senantiasa menjokong perdjuangan Rakjat Kuba jang Revolusioner dalam mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatannja terhadap imperialisme Yankee. Sikap ini adalah sesuai dengan perasaan dan fikiran Rakjat Indonesia. Kongres berkejakinan bahwa Rakjat sedunia tidak akan membiarkan tiap agresi militer Amerika Serikat terhadap Kuba. Setiap serbuan baru dari serdadu² sewaan Amerika Serikat pasti akan mengalami pantai Giron kedua.

Hentikan persiapan² perang terhadap Kuba !

DJANGAN SENTUH KUBA !

Kongres Nasional Ke-VII
(Luarbiasa) PKI

Djakarta, 29 April 1962

ADAKAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN ALDJAZAIR !

Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) PKI jang dilangsungkan pada tanggal 25 s/d 30 April 1962 di Djakarta dengan gembira menjambut gentjatan sendjata di Aldjazair sebagai hasil perundingan^2 jang diadakan berdasarkan persamaan antara Pemerintah Perantjis dan Pemerintah Sementara Republik Aldjazair dikota Evian pada tanggal 18 Maret 1962.

Isi pokok Persetudjuan Evian mengandung pengakuan Perantjis serta djaminan bagi Rakjat Aldjazair untuk menentukan nasibnja sendiri, pengakuan atas kemerdekaan penuh Aldjazair serta keutuhan wilajahnja. Prinsip^2 ini adalah djustru prinsip^2 jang tidak disukai oleh kaum kolonialis Perantjis. Kalau persetudjuan^2 ini bisa dilaksanakan tanpa sabotase oleh kaum kolonialis, maka kemerdekaan dan perdamaian di Aldjazair pada pokoknja terdjamin. Oleh karena itu persetudjuan^2 ini merupakan kemenangan penting bagi Rakjat Aldjazair dalam perdjuangan pembebasan nasionalnja.

Rakjat Aldjazair telah dengan tepat mendjawab taktik muka-dua jang kontra-revolusioner kaum kolonial Perantjis. Rakjat Aldjazair tidak menolak perundingan, tetapi bersamaan dengan itu tetap siap untuk meneruskan perdjuangan bersendjata.

Kekuatan^2 demokratis Perantjis memberikan djuga sumbangannja jang besar dalam menghentikan peperangan kolonial ini. Rakjat Perantjis mengadakan demonstrasi^2 jang gagahberani melawan kaum ultra-kanan Perantjis jang hendak terus menantjapkan kekuasaan kolonial mereka di Aldjazair.

Kongres Nasional ke-VII PKI menjampaikan salut setinggi^{2}nja kepada Rakjat Aldjazair jang heroik dan jang dengan keuletan serta kegigihan perdjuangan sendjata selama 7 tahun ini telah menghasilkan Persetudjuan

Evian, suatu permulaan dari suatu perdjuangan jang baru. Persetudjuan Evian tidak sadja merupakan tonggak penting dalam sedjarah perdjuangan kemerdekaan Rakjat Aldjazair, tetapi djuga telah memberikan sumbangan² positif pada perdamaian dunia.

Kongres mendesak Pemerintah Indonesia agar segera mengadakan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Sementara Aldjazair. Ini akan memperkuat kedudukan serta perdjuangan kekuatan² baru jang sedang tumbuh tidak sadja di Aldjazair, tetapi djuga di-bagian² dunia lainnja.

Kongres Nasional Ke-VII
(Luarbiasa) PKI

Djakarta, 29 April 1962

AMNESTI UNTUK DEMOKRAT² PORTUGAL !

Kongres Nasional ke-VII (Luarbiasa) PKI jang dilangsungkan pada tanggal 25 s/d 30 April 1962 di Djakarta mengikuti dengan tjemas tindakan² se-wenang² Pemerintah Salazar di Portugal terhadap kaum demokrat Portugal.

Takut akan gerakan pembebasan nasional jang makin kuat di-djadjahan² Portugal, takut akan ketidakpuasan Rakjat pekerdja dan klas² tengah Portugal jang makin buruk kehidupannja disebabkan beban pengeluaran² militer, takut akan Partai Komunis Portugal jang dewasa ini makin kuat dan makin terorganisasi lebih baik dan sekarang telah muntjul sebagai kekuatan penggerak pokok dari gerakan demokratis di Portugal, Pemerintah Salazar telah melakukan tindakan² fasis dan takberperikemanusiaan terhadap kaum demokrat Portugal.

Dengan mengumumkan „keadaan darurat" di Portugal, Pemerintah Salazar telah menangkapi setjara besar²-an kaum buruh, kaum tani, kaum intelektuil, penulis², pendeta² liberal, peladjar², perwira² dan pemimpin² oposisi, seperti *Dr. Arlindo Vicente*, tjalon dalam pemilihan

Jang Mulia Perdana Menteri
Abdul Karim Kassem, Bagdad

Kongres Nasional Ketudjuh Partai Komunis Indonesia jang mewakili dua djuta Komunis Indonesia dalam sidangnja di Djakarta April 25-30 mendesak demi hak² azasi manusia agar Ali Sukur, Presiden Federasi Serikat-buruh Irak, segera dibebaskan dari pendjara.

Kongres Nasional Ketudjuh
Partai Komunis Indonesia

Paduka Jang Mulia Presiden de Gaulle
Paris

Kongres Nasional Ketudjuh Partai Komunis Indonesia jang berlangsung di Djakarta April 25-30 dan mewakili dua djuta Komunis Indonesia telah mengambil keputusan untuk mendesak pemerintah tuan agar resolusi sidang kelimabelas Madjelis Umum PBB tentang dihapuskannja kolonialisme segera diwudjudkan di Martinik serta djadjahan² Perantjis lainnja.

Kongres Nasional Ketudjuh
Partai Komunis Indonesia

Presiden Ngo Din Diem
Saigon

Dua djuta Komunis Indonesia jang wakil²nja bersidang dalam Kongres Nasional Ketudjuh Partai Komunis Indonesia di Djakarta April 25-30 mengutuk dan memprotes keras pemerintah tuan jang membantu Amerika Serikat untuk melakukan agresi dan perang kimia terhadap bangsa tuan sendiri. Hasrat Rakjat Vietnam untuk demokrasi, perdamaian nasional serta penjatuan negerinja tidak bisa dipatahkan oleh kesewenangan dan teror rezim tuan.

Kongres Nasional Ketudjuh
Partai Komunis Indonesia